

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama Tahun anggaran 2016 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 196); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 242 A)
20. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 195).

I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2016.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.3.2 Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2016, entitas dalam Pemerintah Kota Ternate yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate sejumlah 41 SKPD sedangkan untuk tahun 2017 Organisasi Perangkat Daerah berubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Ternate No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate yang terdiri dari 40 SKPD sebagai berikut:

a. Entitas Akuntansi Tahun 2016:

No.	SKPD
1	Diknas
2	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum (PU)
5	Kantor Pemadam Kebakaran
6	Dinas Tata Kota dan Pertamanan
7	Bappeda
8	Dinas Perhubungan & Kominfo
9	Dinas Kebersihan
10	Badan Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan
13	Badan Pengendalian Kependudukan & KB Daerah
14	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15	Dinas Koperasi dan UKM
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat
20	Sekretariat Daerah
21	Sekretariat DPRD
22	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
23	Inspektorat
24	Badan Perijinan & Satu Pintu
25	Kec.Kota Ternate Utara
26	Kec.Kota Ternate Selatan
27	Kec.Pulau Ternate
28	Kec. Pulau Moti
29	Kec.Kota Ternate Tengah
30	Kec.Pulau Batang Dua
31	Kec.Pulau Hiri
32	Badan Penanggulangan Bencana Alam
33	Dinas Pendapatan
34	Badan Kepegawaian Daerah
35	Badan Pemberdayaan Masyarakat
36	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
37	Dinas Pertanian dan Kehutanan
38	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian & Perikanan
39	Dinas Kelautan dan Perikanan
40	Dinas Pasar
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

b. Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017:

No.	SKPD
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rkyt Kawasan Pemukiman & Pertanahan
6	Dinas Kebakaran
7	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Dinas Sosial
9	Dinas Tenaga Kerja
10	Dinas Pemb. Perempuan & Perlindungan Anak
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
14	Dinas Pengendalian Kependudukan & KB
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi Informatika & Persandian
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah
18	Dinas Penanaman Mdl & Pelyann Perizinan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda & Olahraga
20	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
21	Dinas Kelautan & Perikanan
22	Dinas Pariwisata
23	Dinas Pertanian
24	Dinas Perindustrian & Perdagangan
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat DPRD
27	Kec.Kota Ternate Utara
28	Kec.Kota Ternate Tengah
29	Kec.Kota Ternate Selatan
30	Kec.Pulau Ternate
31	Kec.Moti
32	Kec.Pulau Hiri
33	Kec.Pulau Batang Dua
34	Inspektorat Daerah
35	Badan Perencanaan Pemb.Penelitian & Pengembangan Daerah
36	BPKAD
37	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah
38	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM
39	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LKPD Kota Ternate TA 2016 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

LKPD tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.3.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2016 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. Laporan operasional yang disajikan tidak melulu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama tahun anggaran 2016. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro
 - II.1. Ekonomi Makro
 - II.2. Kebijakan Keuangan Daerah
 - II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate
 - II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
 - III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
 - III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja Bab IV
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
 - IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
 - IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab V
- Bab V Kebijakan Akuntansi
 - V.1. Entitas Pelaporan
 - V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - V.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - VI.1. Pendapatan -LRA
 - VI.2. Belanja
 - VI.3. Transfer
 - VI.4. Surplus/Defisit
 - VI.5. Pembiayaan
 - VI.6. Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - VI.7. Pendapatan –LO
 - VI.8. Beban
 - VI.9. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
 - VI.10. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - VI.11. Pos Luar Biasa
 - VI.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional
 - VI.13. Komponen Perubahan Ekuitas
 - VI.14 Aset
 - VI.15. Kewajiban
 - VI.16. Ekuitas
 - VI.17 Komponen-Komponen Arus Kas
- VII Penutup

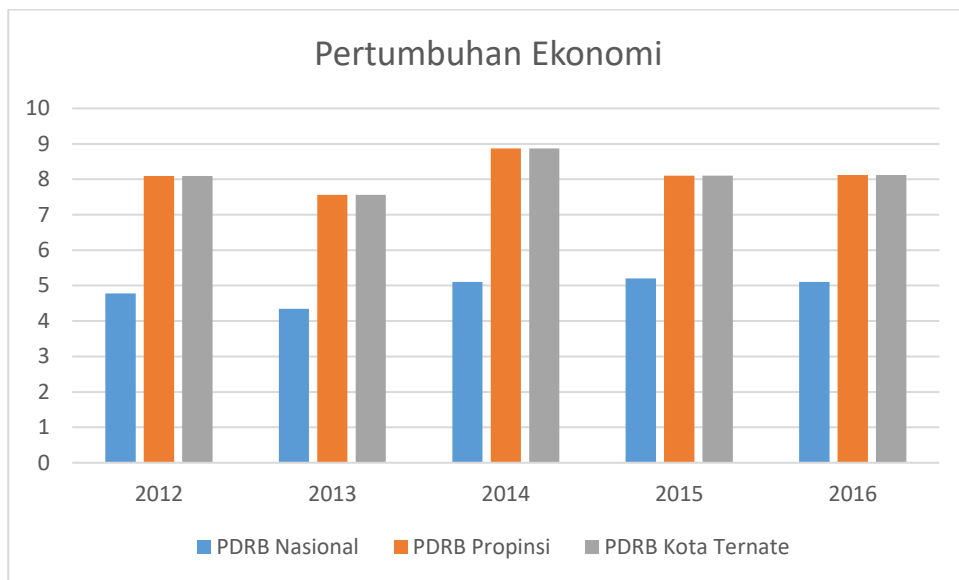
BAB II EKONOMI MAKRO

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflector kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Relatif terjaganya stabilitas ekonomi dengan baik

Tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate berdasarkan harga konstan dalam 3 tahun terakhir (2012-2016)



Berdasarkan grafik diatas perkembangan PDRB Kota Ternate dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (Angka sangat sementara), PDRB Kota Ternate mengalami kenaikan dan berada diatas PDRB Nasional, Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional.

2. Kemampuan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja

Sebagai kota yang memiliki karakteristik perdagangan dan kegiatan jasa, maka penanganan permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pada Tahun 2016 banyaknya pencari kerja Terdaftar di Kota Ternate 1271 orang, pada tahun 2015 sebanyak 820 orang, pada Tahun 2014 sebanyak 1.360 orang, pada tahun 2013 sebanyak 996 orang, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.938 orang. Sedangkan penyerapan tanga kerja pada tahun 2016 adalah sebanyak 402 orang, tahun 2015 adalah sebanyak 85 orang, tahun 2014 adalah sebanyak 537 orang, tahun 2013 tenaga kerja yang diserap adalah sebanyak 265 orang dan tahun 2012 sebanyak 237 Orang. (Data Dinas tenaga kerja dan sosial Kota ternate)



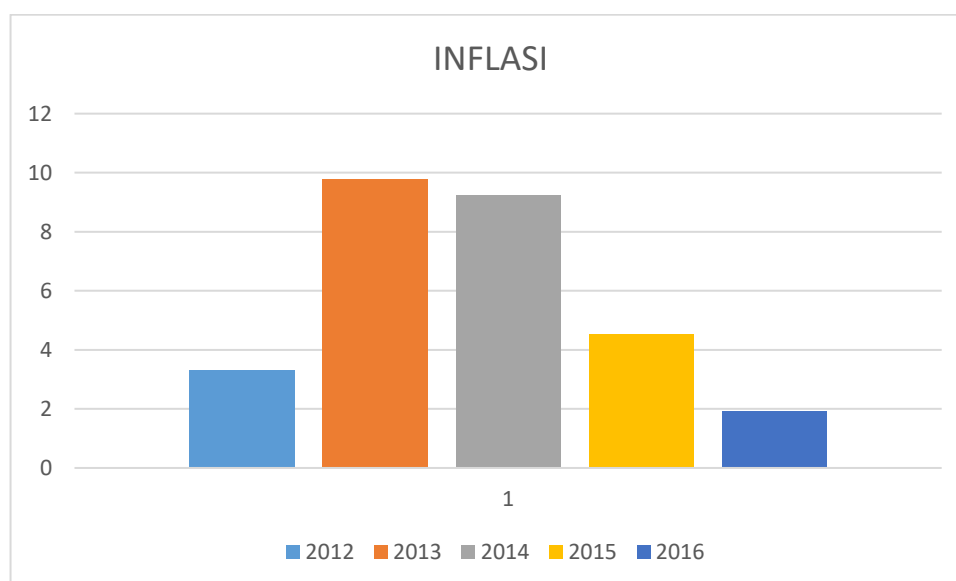
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate.

Dengan melihat perkembangan yang ada, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi dalam kurun waktu 2012-2016 diperkirakan telah mampu meningkatkan banyaknya lowongan kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja, dan menurunnya jumlah pencari kerja dari tahun 2012 sampai Tahun 2016.

3. Tingkat Perubahan Harga (Inflasi)

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan Agregat Makro Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Keseimbangan Eksternal, Daya Saing, Tingkat Bunga, dan Distribusi Pendapatan.

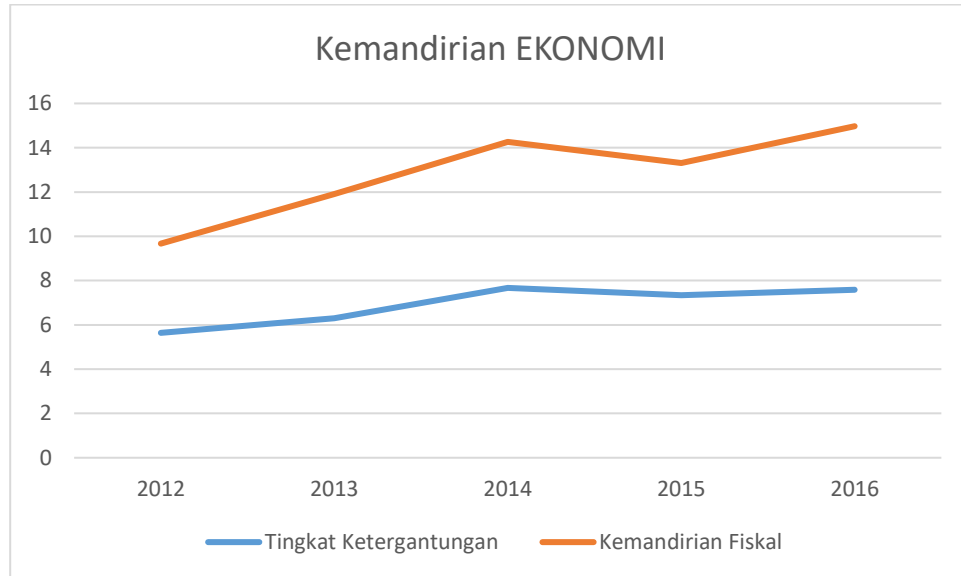
Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi terutama oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan faktor musiman (hari raya dan tahun baru). Berikut disajikan data perkembangan inflasi dari tahun 2012 sampai 2016.



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Ternate dalam kurun waktu 2012 – 2016 mengalami fluktuatif.

4. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian Ekonomi Daerah Kota Ternate dapat dilihat pada grafik diatas yang relatif belum meningkatnya kemampuan Fiskal Daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan Fiskal Daerah ini dapat dilihat dari (1) rasio ketergantungan daerah-pusat yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah (minimal 20%) dan (2) tingkat kemampuan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Tidak Langsung (minimal 100%). Berdasarkan grafik terlihat bahwa tingkat ketergantungan Kota Ternate terhadap Pemerintah Pusat diantara tahun 2012 – 2016 secara rata-rata masih di bawah 10% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2012 – 2016 masih dibawah 100% yaitu rata-rata masih dibawah 11%.



2. 2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dalam bidang Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan melalui upaya stabilisasi dan/atau peningkatan Dana Transfer, dan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran. Dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolak ukur yang digunakan ;
- Peningkatan efesiensi, efektifitas, profesionalitas dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Peningkatan Kapasitas, kompetensi, kreatifitas dan inovasi Sumber Daya Manusia

- (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui kerja sama dan kemitraan (*partnership*) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (*openness*) dan keadilan (*Fairness*) serta tidak memberatkan masyarakat;
 - f. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat *reviewing* terhadap peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - g. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi;

2. Dana Transfer

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal;
- b. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Dana Bagi Hasil seperti pemungutan PBB, PPh 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
- c. Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen dan variabel dalam penghitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti: data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya peningkatan Dana Perimbangan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah merupakan kebijakan yang mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan kedalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum layak pakai serta pengembangan jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah secara lebih khusus terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang mengalami peningkatan sebesar 17.93% diantaranya adalah :

1. Pada kebijakan Belanja Operasi (dari pos tambahan penghasilan guru dan pos tunjangan profesi guru PNSD)
2. Peningkatan Modal sampai dengan 12.95% dengan sasaran pada kepentingan publik sesuai dengan prioritas pembagunan daerah dengan memperhatikan aspek rasionalitas dan proporsionalitas pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan yang mengatur semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Semua penerimaan yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya . Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA APBD KOTA TERNATE

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya , dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kota Ternate memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2016. Penetapan capaian kinerja fiskal Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dan yang kedua adalah melalui Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

URAIAN	APBD	APBD	Perubahan	
		PERUBAHAN	Rp.	%
I Pendapatan	909.004.122.000	935.324.119.411	26.319.997.411	2,89
I.1. PAD	70.934.252.000	73.934.252.000	3.000.000.000	4,23
I.2. Pendapatan Transfer	838.069.870.000	861.389.867.411	23.319.997.411	2,78
II Belanja	953.709.202.538	981.295.292.289	27.586.089.751	2,89
II.1 Belanja Operasi	773.070.774.349	778.181.630.473	5.110.856.124	0,66
II.2 Belanja Modal	173.638.428.189	196.113.661.816	22.475.233.627	12,94
II.3 Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-
URAIAN	APBD	APBD	Perubahan	
		PERUBAHAN	Rp.	%
III Tranfer Bantuan Keuangan	813.109.720	813.109.720	-	-
Bantuan Keuangan	813.109.720	813.109.720	-	-
Surplus/Defisit	(44.705.080.538)	(45.971.172.878)	(1.266.091.340)	-2,83
III Pembiayaan				
III.1 Penerimaan	0	56.850.513.878	56.850.513.878	-
III.2 Pengeluaran	7.500.000.000	10.877.341.000	3.377.341.000	45,03
SiLPA Tahun Berjalan	(52.205.081.538)	2.000.000,00	-	-

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL
PEMERINTAH KOTA TERNATE

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2016 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp981.295.292.289,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp73.934.252.000, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp744.346.850.000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp117.043.017.411,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp.45.971.172.878,00, yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini:

Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	935.324.119.411,00	882.756.713.253,11	(52.567.406.157,89)	94.38
I. 1. Pendapatan Asli Daerah	73.934.252.000,00	69.390.176.544,11	(4.544.075.455,89)	93.85
I. 2. Dana Perimbangan	744.346.850.000,00	735.977.355.407,00	(8.369.494.593,00)	98.87
I. 3. Lain2 Pendapatan Yang Sah	117.043.017.411,00	77.389.181.302,00	(39.653.836.109,00)	65.97
II. Belanja	981.295.292.289	877.571.425.067,22	(103.723.867.211,78)	89.43
II. 1. Belanja Operasi	778.181.630.473	696.887.147.305,14	(81.294.483.167,86)	89.55
II. 2. Belanja Modal	196.113.661.816	175.138.711.262,08	(20.974.950.553,92)	89.30
II. 3. Belanja tak terduga	7.000.000.000	5.545.566.500,00	(1.454.433.500,00)	79.22
Surplus/Defisit	(45.971.172.878)	5.185.288.185,89	(51.156.739.378,11)	11.28
III. Pembiayaan	45.973.172.878	(10.375.350.645,66)	35.597.822.232,34	22.57
III. 1. Penerimaan	56.850.513.878	(1.375.350.645,66)	(55.475.163.232,34)	2.41
III. 2. Pengeluaran	10.877.341.000	9.000.000.000	(1.877.341.000,00)	82.74
SILPA Tahun Berjalan	2.000.000.000	(5.190.062.459,77)	(7.190.062.459,77)	159,50

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 882.756.713.253,11 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 935.324.119.411,00 atau 94,38%.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2012 sampai dengan 2016 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 5 berikut ini:

Tabel III.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2012	38.435.000.000.00	32.907.344.834.00		
2013	43.535.000.000.00	40.572.363.457.00	13.26	23.29
2014	54.493.884.000.00	57.765.211.341.94	25.17	42.37
2015	64.658.500.000.00	60.927.816.606,08	18.65	5.47
2016	73.934.252.000.00	69.390.176.544,11	14.34	13.88

Secara Keseluruhan dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate terus menerus mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp5.100.000.000 atau 13,26%, dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan Rp10,958.884.000 atau 25,17%, dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan Rp10,164.616.000 atau 18,65%', dan tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan Rp 9.275.752.000 atau 14.34%

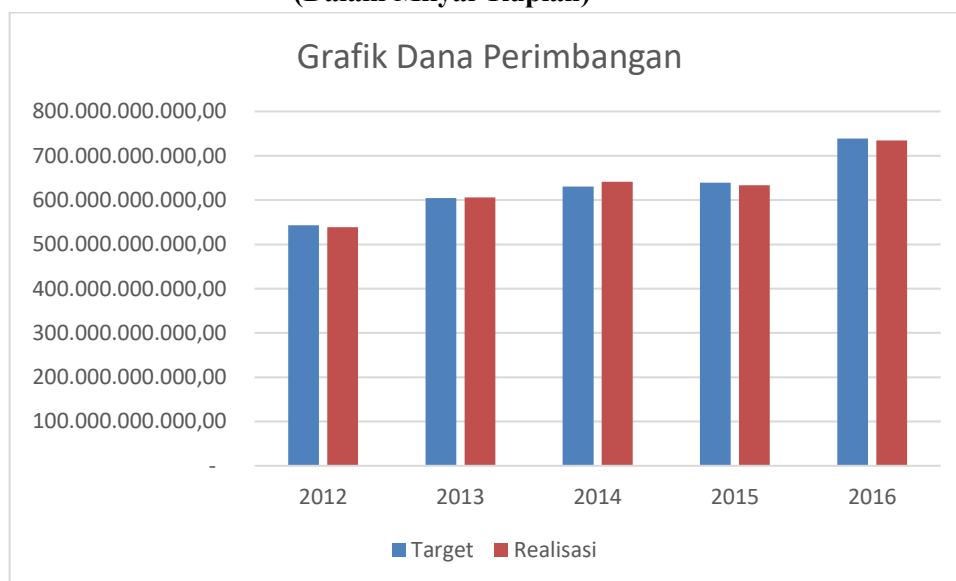
Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, dari tahun anggaran 2012 sampai tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp7.665.018.623 atau 23,29%, kemudian tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2014 sebesar Rp17.192.847.884,94 atau 42.37%, tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp3.162.605.264,14 atau 5.47% dan tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp8.386.949.563,77 atau 13.88%

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp735.977.355.407,00 (98,87%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp744.346.850.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel III.3. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran
2012 – 2016**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2012	543.343.142.000.00	538.753.884.271.00		
2013	604.418.367.000.00	606.008.253.543.00	11.24	12.48
2014	630.640.109.000.00	641.592.436.975.00	4.33	5.87
2015	639.297.411.412.00	633.647.253.093.00	1.37	-1.24
2016	744.346.850.000,00	735.977.355.407.00	16.43	16.14

**Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012 – 2016
(Dalam Milyar Rupiah)**

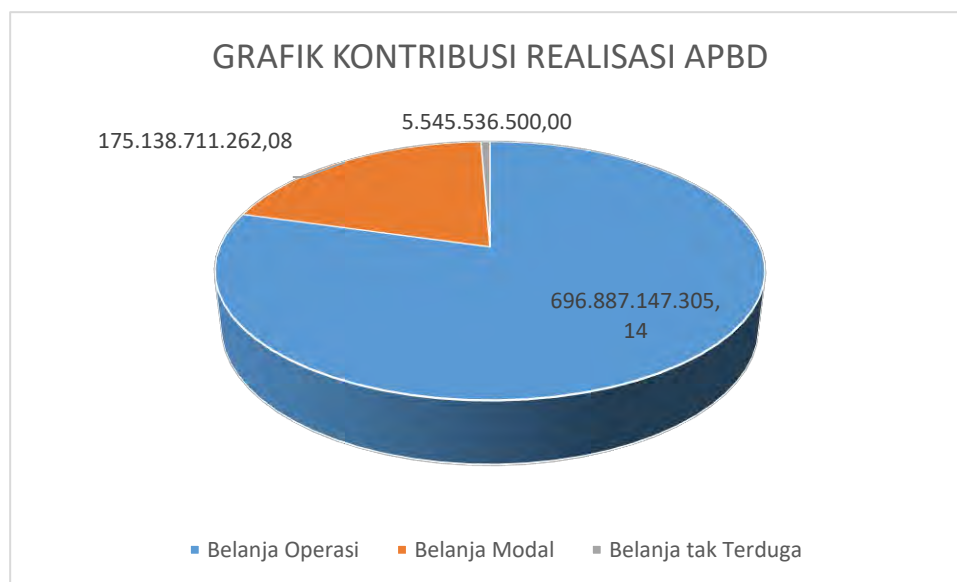


Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp117.043.017.411,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 77.389.181.302,00 atau 66.12%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun Anggaran 2016 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 981.295.292.289,00 dan direalisasikan sebesar Rp 877.571.425.067,22 atau 89,43% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp 103.723.867.221,78 atau 10,57%.

Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja tak terduga Terhadap APBD Tahun Anggaran 2016



Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp778.181.630.473,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp696.887.147.305,14 atau sebesar 89,55%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.196.113.661.816,00 dan Realisasi Rp.175.138.711.262,08 atau 89,30%, sedangkan Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp.7.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.5.545.566.500,00 atau 79,22%.

Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2016

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	469.034.318.719,00	425.903.304.531,00	90.80
2	Belanja Barang dan Jasa	295.125.912.034,00	257.396.943.054,14	87.22
3	Belanja Hibah	7.807.790.000,00	7.657.790.000,00	98.08
4	Belanja Bantuan Sosial	5.400.500.000,00	5.116.000.000,00	94.73
5	Belanja Bantuan Keuangan	813.109.720,00	813.109.720,00	100.00
Jumlah		778.181.630.473,00	696.887.147.305,14	89.55

Belanja Modal diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan- kegiatan dan program. Pada tahun anggaran 2016, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp196.113.661.816,00 dan terealisasi sebesar Rp175.138.711.262,08 atau 89,30%.

Adapun belanja Tak Terduga untuk Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.545.566.500,00 atau 79,22%.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp56.850.513.878,00 dapat direalisasikan sebesar (Rp1.375.350.645.66) , realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SIKPA tahun anggaran sebelumnya.

III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2016, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMERINTAH KOTA
TERNATE

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2016, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp314.906.759.843,00 atau 32,12% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 9 program dengan 82 kegiatan. Tabel 7 di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan

Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
A	<i>URUSAN WAJIB</i>		
1	Bidang Pendidikan		
	a Dinas Pendidikan	312,258,922,212.00	279,478,511,350.00
	b Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	2,647,837,631.00	2,466,238,574.00
2	Bidang Kesehatan	71,457,779,395.00	59.216.766.829,72
3	Bidang Pekerjaan Umum	122,167,331,725.00	113,250,507,079.00
4	Bidang Perumahan (DAMKAR)	9,982,117,659.00	8,183,712,038.00
5	Bidang Penataan Ruang	15,337,498,864.00	12,699,576,752.00
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	14,380,842,109.00	13,187,140,939.00
7	Bidang Perhubungan & Kominfo	20,806,986,831.00	17,620,521,390.00
8	Bidang Lingkungan Hidup		
	a Dinas Kebersihan	16,228,597,481.00	15,204,535,343.00
	b Badan Lingkungan Hidup	5,267,077,840.00	4,885,461,209.00
9	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	4,922,020,950.00	4,398,361,711.00
10	Bidang Pemberdayaan Perempuan	2,185,126,390.00	2,050,314,030.00
11	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6,300,583,556.00	5,628,165,729.00
12	Bidang Sosial	11,939,010,675.00	9,572,396,839.00
13	Bidang Tenaga Kerja		
14	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,911,729,729.00	4,259,172,152.00
15	Bidang Kebudayaan Pariwisata	8,978,914,350.00	7,690,394,190.00
16	Bidang Pemuda dan Olah Raga	9,833,209,465.00	9,152,633,091.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
17	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
a	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	10,770,136,260.00	10,017,157,192.00
b	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	5,316,916,486.00	4,704,676,655.00
18	Bidang Pemerintahan Umum		
a	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	7,507,344,800.00	6,864,048,141.00
b	Walikota/Wakil Walikota	1,025,998,811.00	523,631,180.00
c	Sekretariat Daerah	63,841,492,681.00	57,295,436,105.00
d	Sekretariat DPRD	27,241,624,244.00	22,851,800,630.00
e	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	DPKAD	15,074,193,445.00	12,111,076,089.00
	PPKD	20,208,290,000.00	18,319,356,500.00
f	Inspektorat	8,193,262,777.00	6,342,117,343.00
g	Badan Perijinan Satu Pintu	4,540,077,992.00	3,582,725,143.00
h	Kecamatan Kota Ternate Utara	10,550,702,805.00	9,383,183,415.00
i	Kecamatan Kota Ternate Selatan	11,011,147,632.00	10,617,397,825.00
j	Kecamatan Pulau Ternate	7,460,455,585.00	7,064,022,402.00
k	Kecamatan Moti	3,614,168,685.00	3,428,303,617.00
l	Kecamatan Ternate Tengah	12,733,043,231.00	11,543,358,400.00
m	Kecamatan Batang Dua	3,516,513,927.00	3,360,422,627.00
n	Kecamatan Pulau Hiri	2,760,639,432.00	2,567,924,769.00
o	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,081,189,701.00	4,868,997,199.00
p	Dinas Pendapatan Kota Ternate	22,544,885,180.00	21,628,069,691.00
q	Bidang Kepegawaian	15,555,018,894.00	15,216,213,828.00
20	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,147,921,845.00	16,632,644,841.00
21	Bidang Kearsipan	3,735,782,120.00	3,144,552,314.00
	JUMLAH	919.036.393.395.00	821.011.525.151,72
B	URUSAN PILIHAN		
1	Bidang Pertanian		
a	Dinas Pertanian dan Kehutanan	17,218,346,879.00	14,676,834,999.00
b	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan	8,705,414,669.00	7,412,516,987.00
2	Bidang Kelautan dan Perikanan	14,735,088,276.00	14,093,106,543.50
3	Bidang Perdagangan		
a	Dinas Pasar	12,807,563,718.00	12,183,676,542.00
4	Bidang Perindustrian		
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7,979,375,632.00	7.380.655.124
	JUMLAH	61.445.789.174.00	55.746.790.195,05
	TOTAL	980.482.182.569.00	876.758.315.346,77

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya

penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2016.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrument kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate tahun Anggaran 2016 adalah basis akrual . Dalam basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

1. Pendapatan

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Ternate yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non- exchange transactions). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Ternate untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Ternate menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota

Ternate dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- i. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda dan sanksi);
- ii. Perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- iii. Hibah yang diterima dari pemerintah asing dan atau lembaga internasional;
- iv. Penghapusan utang;
- v. Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- vi. Dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- i. Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
- ii. Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti “pendapatan yang diterima di muka” harus dicatat pada saat kas diterima.

Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- i. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
- ii. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- i. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- ii. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- iii. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja

operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja **operasi** antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset takberwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) bertambah volume, dan/atau
 - (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset non lancar yaitu :

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima permil).
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak

tanggal yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima permil)
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

b. Aset Non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Ternate atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

- investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2016 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi NonPermanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

(ii) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. investasi yang tidak dimaksudkan

dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Menurut Lampiran, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

- a. Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas.
- b. Aset tetap lainnya seperti bang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aseta tetap lainnya tanpa batasan nilai tertentu.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut:

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing- masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452 – DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*), Utang Bunga (*Accrued Interest*), Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. **Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada** setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar

surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat

ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate.

BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2016. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2016.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

VI.1.1. PENDAPATAN –LRA

Pada Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp935.324.119.411,00 dan direalisasikan sebesar Rp882.756.713.253,11 atau 94,38% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	73.934.252.000,00	69.390.176.544,11	93,85	60.927.816.606,08
2	Pendapatan Transfer	861.389.867.411,00	813.366.536.709,00	94,42	756.638.994.464,00
3	Lain-Lain Pendapatan	-	1.260,00		50.927.938,00
Jumlah		935.324.119.411,00	882.756.714.513,11	94,38	817.617.739.008,08

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat realisasi Pendapatan Daerah tidak dapat mencapai target, ada kekurangan target sebesar Rp52.567.406.157,89 (5,62%). Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2015, maka realisasi Tahun Anggaran 2016 lebih tinggi 7,37% atau Rp65.138.974.245,03.

Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016



Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 92% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

VI.1.2. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi		Realisasi 2015
		(Rp.)	2016 Rp.	%	(Rp.)
1	Pajak Daerah	36.100.000.000,00	40.371.419.894,00	111,83	34.563.610.582,00
2	Retribusi Daerah	26.005.000.000,00	16.337.695.972,00	62,83	15.069.299.386,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	850.000.000,00	356.500.800,00	41,94	100.231.200,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	10.979.252.000,00	12.324.559.878,11	112,25	11.194.675.438,08
	J u m l a h	73.934.252.000,00	69.390.176.544,11	93,85	60.927.816.606,08

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang melampaui target, namun secara keseluruhan Target PAD tidak dapat melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2015, maka terjadi peningkatan sebesar Rp8.462.359.938,03 atau 12,19%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 58.18%.

VI.1.2.1. Pendapatan Pajak Daerah

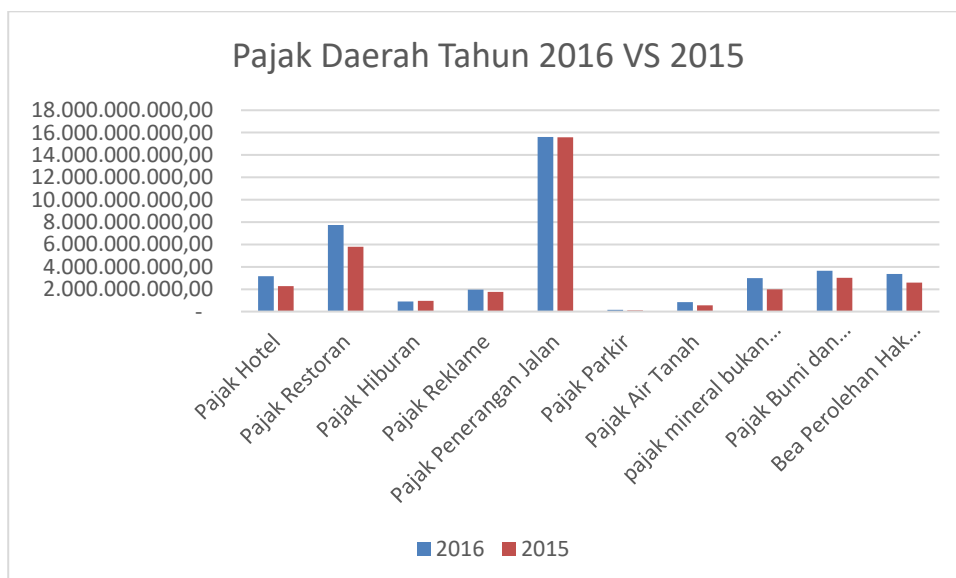
Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	Rp.	%	(Rp)
1	Pajak Hotel	2.400.000.000,00	3.173.351.586,00	132,22	2.265.325.907,00
2	Pajak Restoran	5.300.000.000,00	7.730.596.840,00	145,86	5.780.979.996,00
3	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	887.267.073,00	80,66	944.296.091,00
4	Pajak Reklame	1.850.000.000,00	1.968.097.990,00	106,38	1.767.014.333,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.300.000.000,00	15.605.825.381,00	95,74	15.580.127.492,00
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	155.972.800,00	103,98	94.589.468,00
7	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	857.792.923,00	131,96	559.956.532,00

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	Rp.	%	(Rp)
8	pajak mineral bukan logam	2.150.000.000,00	2.996.150.122.00	139,35	1.975.107.812,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	3.600.000.000,00	3.640.737.280.00	101,13	3.020.765.101,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.600.000.000,00	3.355.627.899.00	129,06	2.575.447.850,00
J u m l a h		36.100.000.000,00	40.371.419.894	111,83	34.563.610.582,00

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa tidak seluruh akun Pajak melampaui target penerimaan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar 45,86% atau melebihi target sebesar Rp2.430.596.840,00. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi terbesar penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 adalah pada realisasi Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp15.605.825.381,00 atau sebesar 38,65% dari total realisasi Pajak Daerah

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2015 – 2016 (dalam Jutaan rupiah)



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2016 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2015.

VI.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi Tahun 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			Rp	%	
I	Retribusi Jasa Umum	7.460.000.000,00	4.860.361.000	65,15	3.888.525.500
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.950.000.000,00	2.537.961.000,00	86,03	1.846.825.500,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	3.125.000.000,00	1.353.100.000,00	43,29	1.233.500.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.150.000.000,00	948.300.000,00	82,46	788.100.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	85.000.000,00	21.000.000,00	24,70	20.100.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	-	-	-
II	Retribusi Jasa Usaha	12.241.000.000,00	8.633.150.370,00	70,52	7.887.917.550,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	913.000.000,00	408.190.100,00	44,70	417.946.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	8.380.000.000,00	7.035.224.270,00	83,95	6.124.669.550,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	1.350.000,00	4,5	-
4	Retribusi Terminal	700.000.000,00	214.100.000,00	30,58	305.800.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000.000,00	294.157.000,00	32,68	381.461.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	109.200.000,00	72,8	98.335.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	450.000.000,00	159.650.000,00	35,47	193.530.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	718.000.000,00	411.279.000,00	57,28	366.176.000,00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	6.304.000.000,00	2.844.184.602	45,11	3.292.856.336,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000,00	1.961.634.797,00	49,04	2.261.296.023,00
2	Retribusi Izin Gangguan	1.950.000.000,00	857.203.605,00	43,95	926.555.313,00
3	Retribusi Izin Trayek	129.000.000,00	15.045.000,00	11,66	16.965.000,00
4	Retribusi Izin Perikanan	150.000.000,00	10.301.200,00	6,86	88.040.000,00
5	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP/TDP)	-	-	-	-
6	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	75.000.000,00	-	-	-
	J u m l a h	26.005.000.000,00	16.337.695.972,00	62,82	15.069.299.386,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 21 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2016, tidak seluruhnya memiliki realisasi. Dari realisasi yang ada total Retribusi daerah hanya dapat tercapai 62.82% dari target yang telah ditentukan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk tahun anggaran 2016 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	356.500.800,00	-	100.231.200,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	850.000.000,00	-	-	-
JUMLAH		850.000.000,00	356.500.800,00	41.94	100.231.200,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa realisasi yang mencapai target diperoleh dari penerimaan pendapatan deviden yang berasal dari PT. BPR Syariah Bahari Berkesan.

VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun anggaran 2016 pos ini terdiri dari:

NO	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	140.000.000,00	0	391.500.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	-	324.145.096,02	0	415.428.801,10
3	Penerimaan Bunga Deposito	-	3.226.025.760,05	0	2.934.828.765,81
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	29.500.000,00	0	12.663.714,00
5	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.979.252.000,00	5.827.345.827,82	73.03	4.334.731.200,47
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA	3.000.000.000,00	2.777.543.194,22	92.58	3.081.211.455,70
7	Pendapatan Yang ditangguhkan Th lalu	-	-	0	24.311.500,00
JUMLAH		10.979.252.000,00	12.324.559.878,11	112.25	11.194.675.438,08

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2016, realisasi penerimaan terbesar untuk Tahun Anggaran 2016 adalah Lain-lain PAD yang sah dan juga merupakan kontribusi terbesar untuk Lain-lain PAD yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

VI.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Propinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp.)	Rp.	%	(Rp.)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	744.346.850.000	735.977.355.407,00	98,88	633.647.253.093,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	91.254.911.000,00	57.231.677.100,00	62,72	97.254.431.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	25.788.106.411,00	20.157.504.202,00	78,17	25.737.310.371,00
	JUMLAH	861.389.867.411,00	813.366.536.709,00	94,42	756.638.994.464,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2016 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 94,42% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2015, maka terjadi peningkatan sebesar Rp56.727.542.245,00 atau 7,49%.

VI.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2016 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	27.268.083.000,00	21.780.524.211,00	79,88	15.938.728.800,00
	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	-	-		15.938.728.800,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	10.456.880.000,00	12.193.682.090,00	116,61	7.779.726.000,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan – LRA	-	-		1.714.247.000,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	-	-		857.137.000,00
	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 ; Pasal 29 ; dan PPh Pasal 21 - LRA	13.939.176.000,00	9.586.842.121,00	68,77	5.587.591.800,00

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.629.810.000,00	2.914.054.196,00	178,80	15.216.237.293,00
	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA	-	-		39.882.000,00
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	529.063.000,00	578.636.567,00	109,37	641.788.837,00
	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	-	1.871.042.250,00		10.546.292.523,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	-	-		183.018.600,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.089.194.000,00	452.025.539,00	41,50	520.245.433,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	-	-		3.276.965.500,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	11.553.000,00	12.349.840,00	106,89	8.044.400,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	621.354.106.000,00	621.354.106.000,00	100,00	547.124.097.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	94.094.851.000,00	89.928.671.000,00	95,57	55.368.190.000,00
	JUMLAH	744.346.850.000,00	735.977.355.407,00	98,87	633.647.253.093,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 98,87%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yaitu sebesar Rp 2.914.054.196,00 atau mencapai 178,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2015, maka terjadi Kenaikan sebesar Rp 102.330.102.314,00 atau 16,14%.

VI.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2015
		2016	2016	%	
1	Dana Penyesuaian				
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	83.463.137.000,00	49.198.717.100,00	58,94	78.104.765.000,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.066.200.000,00	1.652.960.000,00	80	-
	Dana Insentif Daerah - LRA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100	18.424.092.000,00
	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	725.574.000,00	-	-	725.574.000,00
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA	-	1.380.000.000,00	-	-
	JUMLAH	91.254.911.000,00	57.231.677.100,00	62,72	97.254.431.000,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk pada Tahun 2016 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian dan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 40.022.753.900,00 atau 41,15%.

VI.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2016 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	PKB	4.000.000.000,00	3.565.838.744,00	89,14	7.138.061.293,00
2	BBNKB	5.000.000.000,00	3.249.962.194,00	64,99	890.722.428,00
3	PBBKB	10.500.000.000,00	8.531.062.080,00	81,24	6.824.692.392,00
4	P3ABT	850.000.000,00	14.801.211,00	1,74	2.195.111.648,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	5.438.106.411	4.795.839.973,00	88.18	8.688.722.610,00
Jumlah		25.788.106.411	20.157.504.202	78.17	25.737.310.371,00

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp20.157.504.202,00 (78.16%) tidak dapat mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2015, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.579.806.169,00 atau(21.68%)

VI.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2016 penerimaan Bantuan Keuangan tidak dianggarkan sehingga untuk tahun 2016 penerimaan dari akun Bantuan keuangan nihil.

VI.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kota Ternate tidak menganggarkan penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, adapun realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2016 sebesar Rp1.260,00 berasal dari kesalahan pencatatan penerimaan oleh Bank BPD Maluku dan di tahun 2017 telah di perbaiki..

VI.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2016 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp981.295.292.289,00 dan direalisasikan sebesar Rp877.571.425.067,22 atau 89,43%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp103.723.867.221,78 (10,57%). Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
			Rp	%	
1	Belanja Operasional	778.181.630.473,00	696.887.147.305,14	89,55	675.064.937.725,44
2	Belanja Modal	196.113.661.816,00	175.138.711.262,08	89,30	150.235.317.734,00
3	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	5.545.566.500,00	79,22	6.070.200.000,00
JUMLAH		981.295.292.289,00	877.571.425.067,22	89,42	831.370.455.459,44

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga yaitu sebesar 79,22%.

VI.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Ternate yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	469.034.318.719,00	427.146.588.115,00	91,06	414.729.923.791,00
2	Belanja Barang dan Jasa	295.125.912.034,00	256.153.659.470,14	86,79	208.510.954.144,44
3	Belanja Hibah	7.807.790.000,00	7.657.790.000,00	98,07	45.610.450.100,00
4	Belanja Bantuan Sosial	5.400.500.000,00	5.116.000.000,00	94,73	5.400.500.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Transfer	813.109.720,00	813.109.720,00	100,00	813.109.720,00
JUMLAH		778.181.630.473,00	696.887.147.305,14	89,55	675.064.937.725,44

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2016 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp696.887.147.305,14 (89,55%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp778.181.630.473,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp81.294.483.167,86 (10,45%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp675.064.937.725,44 maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran sebesar Rp21.822.209.579,7 (3,23%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2016:

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp425.903.304.531,00(76,89%) dengan sisa anggaran sebesar Rp43.131.014.188 (9,20%), realisasi ini terutama di gunakan untuk:
 - a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja tidak langsung) sebesar Rp424.250.070.531,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja langsung) sebesar Rp2.896.517.584,00, diantaranya dalam bentuk honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

2. Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2016 direalisasikan sebesar Rp256.153.659.470,14 atau 86.79% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp37.728.968.979,86 (13.21 %). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan Pakai Habis	16,792,925,409.00	15,428,582,703.50	91.88
Belanja Bahan/Material	26,975,645,280.00	23,187,721,047.00	85.96
Belanja Jasa Kantor	26,070,624,887.00	22,816,094,541.00	87.52
Belanja Premi Asuransi	2,127,439,000.00	1,710,942,876.00	80.42
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,397,388,857.00	5,977,119,087.00	93.43
Belanja Cetak dan Penggandaan	8,696,752,381.00	8,003,124,833.00	92.02
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,783,652,600.00	3,325,117,252.00	87.88
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	861,060,340.00	595,594,910.00	69.17
Belanja Sewa Alat Berat	100,000,000.00	99,979,000.00	99.98
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,044,926,300.00	1,740,881,697.00	85.13
Belanja Makanan dan Minuman	26,764,625,498.00	21,166,289,656.00	79.08
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,067,028,178.00	928,425,000.00	87.01
Belanja Pakaian Kerja	778,775,925.00	775,231,000.00	99.54
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	711,259,998.00	710,724,000.00	99.92
Belanja Perjalanan Dinas	61,130,600,519.00	52,994,282,054.00	86.69
Belanja Pemeliharaan	5,795,615,234.00	5,209,744,446.00	89.89
Belanja Jasa Konsultansi	1,114,451,715.00	872,157,550.00	78.26
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11,290,603,840.00	11,081,808,560.00	98.15
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,723,000,000.00	1,650,000,000.00	95.76
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1,671,988,000.00	1,369,965,200.00	81.94
Belanja Honorarium Non Pegawai	10,450,000.00	10,450,000.00	100.00
Belanja Honorarium PNS	26,444,239,455.00	23,195,034,320.00	87.71
Belanja Honorarium Non PNS	55,375,354,437.00	49,441,949,115.00	89.29
Belanja Barang Dana BOS	166,800,000.00	166,800,000.00	100.00
Blnj yg bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kshtn Nasional	3,000,000,000.00	2,772,533,977.64	92.42
Belanja barang modal yg tidak dikapitalisasi	1,170,743,181.00	923,106,645.00	78.85
Total	295,125,912,034.00	256,153,659,470.14	86.79

Berdasarkan table diatas, terdapat beberapa belanja barang dan jasa dengan sisa anggaran yang signifikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Bahan pakai Habis terealisasi sebesar 91,88% dan menyisakan anggaran sebesar Rp1.364.342.705,50 yang disebabkan antara lain tidak optimalnya belanja Bahan pakai habis.
- b. Belanja Bahan/Material terealisasi sebesar 85,96% dan menyisakan anggaran sebesar Rp3.787.924.233,00 yang disebabkan antara lain tidak optimalnya belanja

bahan/material pada SKPD seperti pada Dinas Kesehatan terdapat belanja sebesar Rp1.951.089.590,00 yang pembayarannya di lakukan pada tahun depan.

- c. Belanja Makan dan Minum terealisasi sebesar 79,08% dan menyisakan anggaran sebesar Rp5.598.335.842,00 yang disebabkan antara lain efisiensi belanja Makan dan Minum di tahun ini terutama pada beberapa SKPD seperti Dinas Kesehatan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.207.985.000, Sekretariat Daerah terdapat sisa anggaran sebesar Rp842.817.105,00 , Dinas Pendidikan terdapat sisa anggaran sebesar Rp547.027.000,00, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terdapat sisa anggaran sebesar Rp517.593.596,00 dan Sekretariat DPRD terdapat sisa anggaran sebesar Rp395.871.600,00
- d. Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar 86,69% dan menyisakan anggaran sebesar Rp8.136.318.465,00 yang disebabkan oleh kurang optimalnya belanja perjalanan Dinas Luar Daerah pada beberapa SKPD dan juga langka efisiensi belanja yang dilakukan pada tahun ini seperti Dinas Kesehatan yang terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.277.817.600,00, Sekretariat DPRD terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.588.067.015,00, Inspektorat yang terdapat sisa anggaran sebesar Rp649.778.500,00 Sekretariat Daerah terdapat sisa anggaran sebesar Rp634.089.702,00 dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terdapat sisa anggaran sebesar Rp592.623.360,00. Belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp61.130.600.519,00 dan direalisasikan sebesar Rp52.994.282.054,00 (86,69%).
3. Pos Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp7.807.790.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.739.598.560,00 atau 240,01%. Realisasi belanja yang melebihi anggaran tersebut disebabkan karena adanya kewajiban konversi dari belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat/ pihak ke tiga sesuai point 2.a diatas sebesarRp11.081.808.560,00 kedalam belanja Hibah. Rincian atas belanja Hibah sebesar Rp18.739.598.560,00 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
a	Belanja Hibah	7.807.790.000,00	7.657.790.000,00
b	Belanja yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	14.335.790.776,00	11.081.808.560,00
	Total	22.143.580.779,00	18.739.598.560,00

a. Rincian Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PKK Kota Ternate	700.000.000,00	700.000.000,00	100
2	Dharma Wanita Kota Ternate	500.000.000,00	500.000.000,00	100
3	Pramuka	1.044.590.000,00	1.044.590.000	100
4	KORPRI	750.000.000,00	750.000.000	100
5	KONI Kota Ternate	1.600.000.000,00	1.600.000.000	100
6	PMI	300.000.000,00	300.000.000,00	100
7	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000,00	250.000.000,00	100
8	Badan Amil Zakat (BAZDA)	600.000.000,00	600.000.000,00	100
9	Dewan Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	100
10	PGRI	200.000.000,00	200.000.000,00	100
11	MUI	150.000.000	-	-
12	KNPI	200.000.000	200.000.000	100

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
13	Bantuan Oprasional Penyelenggara PAUD	1.213.200.000	1.213.200.000	100
14	Persatuan Wiredata Republik Indonesia	100.000.000	100.000.000	100
		7.807.790.000,00	7.657.790.000,00	98.08

a. Rincian Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ke tiga.

No	Nama SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum	4.684.456.700,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	144.400.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	229.320.000,00
4	Sekretariat Daerah	399.500.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.871.535.580,00
6	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	17.710.000,00
7	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB	264.000.000,00
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat	93.489.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	377.397.280,00
	Jumlah	11.081.808.560,00

4. Pos Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp5.400.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.116.000.000,00 atau 94.73%. Realisasi pos belanja ini diperuntukkan seluruhnya untuk Organisasi Sosial kemasyarakatan.

5. Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp813.109.720,00 dan direalisasikan sebesar Rp813.109.720,00 atau 100 % Realisasi pos belanja ini diperuntukkan seluruhnya untuk Bantuan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian Belanja Bantuan Partai Politik

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	DPD Golakr	106.917.440,00	106.917.440,00	100
2	DPD Demokrat	84.435.330,00	84.435.330,00	100
3	DPD PAN	49.567.430,00	49.567.430,00	100
4	DPC PDI - P	100.995.560,00	100.995.560,00	100
5	DPC Hanura	43.127.790,00	43.127.790,00	100
6	DPD PKS	49.567.430,00	49.567.430,00	100
7	DPC PPP	84.038.920,00	84.038.920,00	100
8	DPC PBB	43.516.110,00	43.516.110,00	100
9	DPD Nasdem	82.760.700,00	82.760.700,00	100
10	DPC Gerindra	62.325.360,00	62.325.360,00	100
11	DPC PKPI	49.397.540,00	49.397.540,00	100
12	DPC PKB	56.460.110,00	56.460.110,00	100
		813.109.720,00	813.109.720,00	100

VI.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Ternate adalah pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

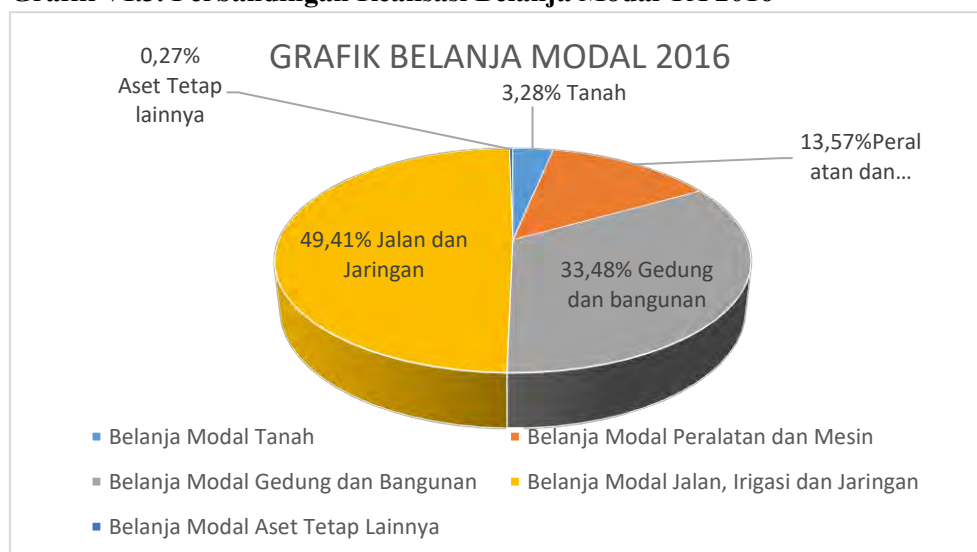
No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Tanah	6.387.077.470,00	5.739.946.020,00	89,87	8.654.567.750,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.390.977.715,00	23.762.118.596,08	80,85	26.201.398.536,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.500.343.005,00	58.631.424.444,00	85,59	62.770.011.284,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.748.130.382,00	86.531.882.802,00	95,35	49.332.257.968,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.087.133.244,00	473.339.400,00	43,54	3.277.082.196,00
	J u m l a h	196.113.661.816,00	175.138.711.262,08	89,30	150.235.317.734,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp196.113.661.816,00 dan direalisasikan sebesar Rp175.138.711.262,08 atau 89,30%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama tahun anggaran 2016.

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, hal ini disebabkan karena tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam baranginventaris.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2016.

Grafik VI.3. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016



Rincian masing-masing belanja modal dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah :

Dari belanja modal tanah sebesar Rp5.739.946.020,00 tersebut terdapat belanja tanah yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp2.369.246.020,00 karena rincian belanja tanah tersebut tidak sesuai peruntukan. Adapun perinciannya sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	1,763,440,020.00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	558,306,000.00
3	Kec. Pulau	47,500,000.00
	TOTAL	2,369,246,020.00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

Dari belanja Modal peralatan mesin sebesar Rp23.762.118.596.08 tersebut terdapat belanja peralatan mesin yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp1.450.307.728,00 di karenakan :

- a. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam batas minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp1.406.648.728,00
- b. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam aset karena salah rekening (Belanja pakai habis) Rp43.659.000,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

Dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp58.631.424.444,00 tersebut terdapat belanja modal gedung dan bangunan yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp4.646.922.000,00 karena diserahkan/ dihibahkan kepada pihak ketiga (sekolah swasta)

4. Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan :

Dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp86.531.882.802. Ada senilai Rp84.900.000,00 merupakan nilai jaringan.

5. Belanja Modal aset tetap lainnya :

Dari belanja modal aset tetap lainnya Rp473.339.400,00 tersebut terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang tidak menghasilkan aset sebesar Rp.74.330.000,00 yang akan diserahkan ke sekolah swasta.

VI.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Ternate. Pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.545.566.500,00 (79.22%).

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	Rp.	%	(Rp)
1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	5.545.566.500,00	79,22	6.070.200.000,00
	J u m l a h	7.000.000.000,00	5.545.566.500,00	79,22	6.070.200.000,00

VI.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Ternate ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kota Ternate tidak mengalokasikan pengeluaran Transfer.

VI.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan defisit anggaran sebesar (Rp45.971.172.878,00), namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp5.185.288.185,89

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	Rp.	%	(Rp)
1	Surplus/Defisit	(45.971.172.878,00)	5.185.288.185,89	11,28	(13.752.716.451,36)
	J u m l a h	(45.971.172.878,00)	5.185.288.185,89	11,28	(13.752.716.451,36)

VI.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Ternate terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2016 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar (Rp1.375.350.645,66).

VI.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10.877.341.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 82,74%.

VI.4.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2016.

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016		Realisasi 2015 (Rp)
			Rp.	%	
1	SILPA/SIKP A	2.000.000,00	(5.190.062.459,77)	259,50 3	(1.375.350.645,66)
	J u m l a h	2.000.000,00	(5.190.062.459,77)	259,50 3	(1.375.350.645,66)

SILPA untuk Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan direalisasikan sebesar (Rp5.190.062.459,77) atau 259,503%.

SALDO ANGGARAN LEBIH

VI.6. KOMPONEN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Komponen-komponen Perubahan Saldo anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

VI.6.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.375.350.645,66.

VI.6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2015 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp1.375.350.645,66.

VI.6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2016 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp Rp5.190.062.459,77.

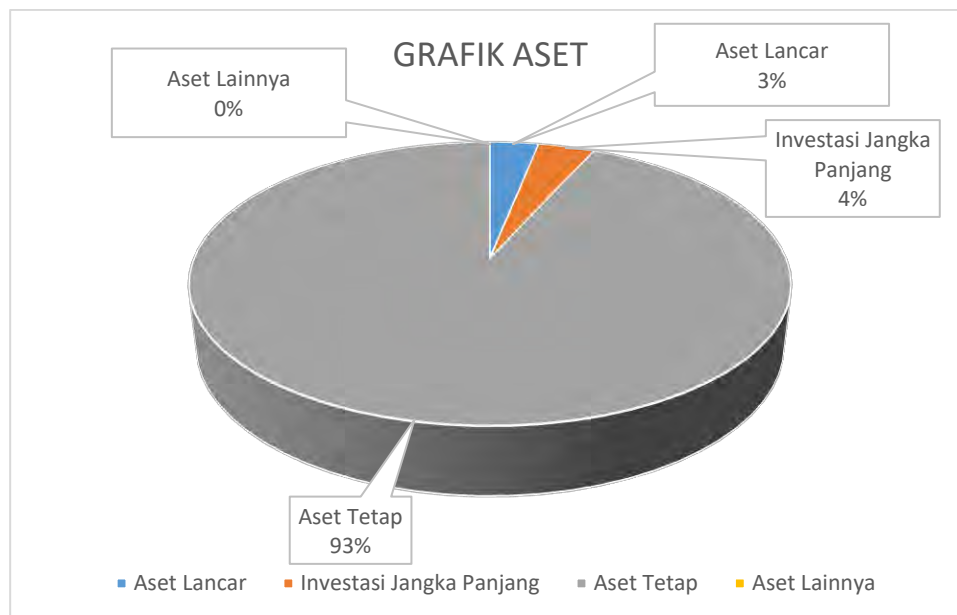
VI.7. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Ternate terbagidalam:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Aset Lancar	52.385.486.127,67	27.062.407.256,58
2	Investasi Jangka Panjang	47.562.964.208,18	45.243.188.541,77
3	Aset Tetap	1.218.172.864.562,45	1.118.442.229.827,64
4	Aset Lainnya	47.986.297.787,25	71.997.808.138,25
	J u m l a h	1.366.107.612.685,55	1.262.745.633.764,24

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp103.361.978.921,31 atau 8,19%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 89,17% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Ternate.

Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2016



VI.7.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
1	Kas dan Setara Kas		15.424.644.650,63		12.836.406.859,34
	a. Kas di kas Daerah	7.849.016,79		58.345.089,08	
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	172.616.500,00		5.536.000,00	
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	42.044.283,00		414.298.605,00	
	d. Kas Lainnya	1.327.473.583,84		1.322.464.367,26	
	e. Setara Kas	13.874.661.267,00		11.035.762.798,00	
2	Piutang		24.045.730.382,42		7.186.308.850,60
	a. Piutang Pendapatan	28.691.192.028,00		7.491.698.396,00	
	b. Piutang Lainnya	203.898.586,00		281.772.104,00	
	c. Penyisihan piutang	(4.849.360.231,58)		(587.161.649,40)	
3	Beban Dibayar Dimuka	147.829.698,62	147.829.698,62	95.056.666,64	95.056.666,64
4	Persediaan	12.767.281.396,00	12.767.281.396,00	6.944.634.880,00	6.944.634.880,00
	JUMLAH		52.385.486.127,67		27.062.407.256,58

VI.7.1.1. Kas di Kas Daerah

Pos kas di kas daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.849.016.79 meliputi uang kas yang ada di bendahara umum daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening Giro	Nilai (Rp)
1	Bank Maluku Rek 0601022001	2.763.579,79
2	Bank Maluku Rek 0601002024	0,00
3	Bank Maluku Rek 0601002034	0,00
4	Bank Maluku Rek 0601002054	0,00
5	BNI Rek 0086130053	5.085.437,00
6	BPRS Bahari Berkesan 011100103	0,00
7	BPRS Bahari Berkesan 011100102	0,00
8	BPRS Bahari Berkesan 011100101	0,00
9	BPRS Bahari Berkesan 011100100	0,00
10	BRI Penerimaan 010301001765308	0,00
11	BRI PBB 010301001766304	0,00
	Jumlah	7.849.016,79

VI.7.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk tahun 2016 sampai akhir tahun adalah Rp172.616.500,00, adalah kas dibendahara dinas kebersihan.

VI.7.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja dan kas pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sisa Kas sampai akhir Tahun 2016 adalah sebesar Rp42.044.283,00 berasal dari sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari :

No	SKPD	Sisa Belanja
1	Bappeda	24.681.426,00
2	SETDA	241.407,00
3	BP4K	147,00
4	Dinas Pasar	1.000.000,00
5	Kantor Satuan Pamong Praja	2.014.300,00
6	Kec.TTE Tengah	14.107.003,00
	JUMLAH	42.044.283,00

VI.7.1.4. Kas di FKTP

Kas di FKTP merupakan kas yang ada di Bendahara Puskesmas. Saldo Kas di FKTP Per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.327.473.583,84 yang terdiri dari :

No	NAMA FKTP	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Puskesmas Jambula	88.800.087,19	167.238.122,06	180.820.264,41	75.217.944,84
2	Puskesmas Gambesi	48.825.584,31	169.588.378,60	209.615.783,85	8.798.179,06
3	Puskesmas Kalumata	231.641.460,61	537.743.249,42	525.329.879,87	244.054.830,16
4	Puskesmas Kalumpang	82.068.080,79	262.343.847,38	232.298.601,17	110.113.327,00
5	Puskesmas Kota	210.812.138,87	304.381.195,13	295.478.853,03	219.714.480,97
6	Puskesmas Sulamadaha	102.803.524,64	258.993.910,53	277.486.237,11	84.311.198,06
7	Puskesmas Siko	268.401.557,48	556.014.344,03	550.005.228,81	274.410.626,90
8	Puskesmas Mayau	75.752.798,80	124.094.847,62	112.517.019,52	87.330.745,90
9	Puskesmas Hiri	56.981.986,04	162.678.543,69	152.485.458,73	67.175.071,00
10	Puskesmas Moti	156.377.148,53	234.466.755,76	234.496.650,55	156.347.253,74
	Total	1.322.464.367,26	2.777.543.194,22	2.772.533.977,64	1.327.473.583,84

VI.7.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, kas Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOS maupun Kas di FKTP. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.13.874.661.267,00 merupakan :

- Saldo kas yang ada di Rekening Retur, dimana untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp.3.367.269.815,00 dan dana untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) sebesar Rp.10.452.159.417,00. Dana tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum sempat disalurkan kepada guru dan rekanan.
- Serta saldo Kas PFK Pemerintah Pusat sebesar Rp. 55.232.035,00 berasal dari saldo kas Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan,

Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi & UKM, Kec. Ternate Tengah, BP4K & Dinas Pertanian & Kehutanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum di setor ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Utang PFK
1	Dinas Perhubungan	34.400.500,00
2	Sekretariat Daerah	10.541.106,00
3	Dinas Kopersi dan Usaha Kecil Menengah	4.858.135,00
4	Kec.Ternate Tengah	245.000,00
5	BP4K	2.563.924,00
6	Dinas Pertanian dan Kehutanan	2.623.370,00
	JUMLAH	55.232.035,00

VI.7.1.6. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dirinci sebagaiberikut:

No	Uraian	Piutang 2016	Piutang 2015
1	Piutang Pajak	12.954.046.064,00	6.625.504.725,00
2	Piutang retribusi	59.422.000,00	67.422.000,00
3	Piutang bagi hasil Propinsi	15.677.723.964,00	794.777.813,00
	JUMLAH	28.691.192.028,00	7.487.704.538,00

- a. Piutang Pajak,akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Piutang Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Pitang 2016	Piutang 2015
Pajak Hotel	2.169.110.140,00	2.169.110.140,00
Pajak Restoran	1.482.892.241,00	1.441.474.341,00
Pajak Hiburan	11.857.625,00	0,00
Pajak Reklame	70.575.294,00	194.419.925,00
Pajak Air Tanah	108.156.484,00	149.488.741,00
Pajak Bumi dan Bangunan	7.707.686.795,00	2.671.011.578,00
JUMLAH	12.954.046.064,00	6.625.504.725,00

- b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ternate merupakan piutang pada pelayanan Dinas Pasar sebesar Rp59.422.000,00.
- a. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp1.557.758.828,00.

VI.7.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsurang adalah saldo dari penjualan kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2016 saldo sebesar Rp.0,00 sedangkan saldo 31 Desember 2015 sebesar Rp.52.237.500,00, tagihan tersebut telah

dilunasi pada tahun 2016.

VI.7.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

Saldo Bagian Lancar tuntutan ganti rugi netto tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp.229.272.104,00 dan Rp.203.898.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	kasus	Tgl.SK TJM	Jangka waktu	Jatuh Tempo	Pelunasan 2016	Sisa Per 31 Des 2016
1	Novita Yani	Penggunaan uang belanja TA 2012 utk kepentingan pribadi an. Mantan bendahara Ktr KB	29 Des 2014	24 Bln	29 Des 2016	Rp.10.800.000	13.532.124,00
2	Asian Hi. Rufai	Kehilangan kas pada kec.Hiri Thn 2012	24 Des 2014	24 Bln	24 Des 2014	Rp.600.000	17.326.462,00
3	Siti Nur Nelny Teng. SE	Penggunaan uang belanja utk kepentingan pribadi di SKPD Kec. Ternate Tengah	04 Mei 2012	24 Bln	4 Mei 2014		154.050.000,00
4	Leni Marlina Ponto	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan dinas oleh BPK Thn 2011 & 2012 (yg sudah ada SKTJM)	4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014		8.350.000,00
5	Sutopo Abdullah	-	4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014		3.350.000,00
6	Andi Handoko	-	4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014		6.750.000,00
7	M.T Arsyad	-	4 Nov 2014	30 hari	4 Des 2014		540.000,00
		Total					203.898.586,00

VI.7.1.9. Beban dibayar dimuka.

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp147.829.698,62 yang berasal dari beban yang sudah dibayar dan manfaatnya belum seluruhnya di terima dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	URAIAN	BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	DPKAD	Beban sewa jaringan VPN	68.828.054,79
2	BAPPEDA	Beban sewa internet	10.933.150,68
3	KEC. BATANG DUA	Beban sewa rumah dinas	3.328.767,12
4	KEC. HIRI	Beban sewa rumah dinas	8.328.767,12
5	KPPPA	Beban sewa rumah AMAN	7.643.835,62
6	Sekda	Beban Sewa Rumah	48.767.123,29
JUMLAH			147.829.698,62

VI.7.1.10. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2016 terdiri dari Barang Pakai Habis, Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan blanko KTP/KK dan barang berupa tanah dan peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain di tahun 2016.

Rincian persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	NILAI
1	DIKNAS	2,321,748.00
2	DINAS KESEHATAN	2,434,076,305.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	8,499,160,700.00
4	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	38,720,000.00
5	DINAS TATA KOTA & PERTAMANAN	172,771,090.00
6	BAPPEDA	256,000.00
7	DINAS PERHUBUNGAN	1,857,000.00
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	140,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	36,384,150.00
10	DINAS TENAGA KERJA & SOSIAL	430,000.00
11	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	20,000.00
12	SEKRETARIAT DPRD	288,500.00
13	INSPEKTORAT	838,000.00
14	KEC. KOTA TERNATE TENGAH	1,350,000.00
15	DINAS PENDAPATAN	1,578,667,903.00
JUMLAH		12,767,281,396.00

VI.7.2 Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi adalah untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2016, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp47.562.964.208,18 yang dimiliki Pemerintah Kota Ternate seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.7.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Pemerintah Kota Ternate memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT. Bank Maluku	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
PDAM	25.766.916.654,23	24.482.778.698,18
PT. Bahari Berkesan (Holding Company)	18.296.047.553,95	17.260.409.843,59
	47.562.964.208,18	45.243.188.541,77

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016.

- a. Jumlah Penyertaan Modal pada Bank Maluku adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan atas kepemilikan 400 saham (Nomor A BM 0016501 s/d 0016900).

No	Penyertaan Modal PT. Bank Maluku	Nilai
1	Sampai Dengan 2005	500.000.000.00
2	Penambahan tahun 2006	500.000.000.00
3	Penambahan tahun 2007	500.000.000.00
4	Penambahan tahun 2009	500.000.000.00
5	Penambahan tahun 2012	500.000.000.00

No	Penyertaan Modal PT. Bank Maluku	Nilai
6	Penambahan tahun 2013	500.000.000.00
7	Penambahan tahun 2014	500.000.000.00
	JUMLAH	3.500.000.000.00

Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate terhadap Bank Maluku yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Maluku dicatat dengan menggunakan metode biaya.

- b. Sesuai Neraca Audited PDAM per 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa jumlah Ekuitas sebesar Rp62.526.136.533,87 dan berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate tahun 2016 tersebut. Dimana nilai kepemilikan Pemerintah Kota Ternate atas nilai aset pada PDAM adalah sebesar 46%, penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, gedung dan bangunan, alat angkut serta dana tunai) dimana dari prosentase tersebut nilai investasi Pemerintah Kota ternate pada PDAM adalah sebesar Rp25.766.916.654,23 (Rp62.526.136.533,87 x 46%).
- c. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Ternate sesuai Peraturan Daerah Nomr 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014, Membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas atau PT Ternate Bahari Berkesan, dengan tujuan didirikannya Perseroan adalah :
 - Sebagai Perusahaan induk (Holding Company) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Ternate.
 - Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kota Ternate.
 - Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Kota Ternate.

Modal dasar PT. Ternate Bahari Berkesan berasal dari pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotik Bahari berkesan, PT. BPRS Bahari Berkesan dan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.

Dengan di berlakukannya Peraturan Darah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Darah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate bahari Berkesan ini maka Peratuahn Darah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Darah Citra Gamalama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Aset PD. Citra Galama menjadi Aset PT. Ternate Bahari Berkesan.

Setelah dilakukan Konsolidasi atas Laporan Keuangan perusahaan-perusahaan daerah tersebut dapat dilihat pada Lampiran diketahui jumlah investasi pemerintah Kota ternate untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp18.541.827.109,12 dengan akumulasi Laba/rugi sebesar (Rp386.938.353,68) sehingga jumlah penyertaan modal bersih adalah sebesar Rp18.296.047.553,95 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

BPRS BAHARI BERKESAN

No	Nama	Jumlah saham (lembar)	Nominal (Rp)	Presentase
1	Pemerintah Kota Ternate	8000	8.000.000.000,00	96,79 %
2	Ir. Arifin Jafar	20	20.000.000,00	0,24 %
3	Hj. Nursia Abdul Haris	95	95.000.000,00	1,15 %
4	Muhammad Hasan Bay	150	150.000.000,00	1,81 %
	Total	8.265	8.265.000.000,00	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan untuk priode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 (unaudited), Jumlah modal disetor yang tercatat, telah sama dengan hasil RUPS, yaitu sebesar Rp18.541.827.109,12 dengan Kepemilikan Pemerintah Kota Sebesar Rp. 18.296.047.553,95,00 atau 98,67 %.

VI.8 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap sebesar **Rp 1.218.172.864.562,45** merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2016 dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi sampai sebagai berikut:

Jenis Aset	Saldo 31 Des. 2015	Penambahan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo 31 Des 2016
Tanah	228.381.464.460,00	5.739.946.020,00	9.223.305.400,00	5.103.870.020,00	238.240.845.860,00
Peralatan dan Mesin	175.889.138.535,35	23.762.118.644,36	6.516.038.505,00	3.093.664.680,00	203.073.631.004,00
Gedung dan Bangunan	769.423.321.241,46	58.631.424.443,64	24.841.000.588,00	41.282.135.342,00	811.613.610.930,59
Jalan, irigasi dan Jaringan	672.068.213.240,04	86.531.882.801,18	10.775.842.336,00	10.051.714.607,00	759.324.223.772,08
Aset tetap lainnya	20.176.327.756,00	473.339.400,00	4.407.738.640,00	74.330.000,00	24.983.075.796,09
Konstruksi dlm Pekerjaan	39.509.779.434,79	00,00	24.087.438.720,00	14.633.451.869,00	48.963.766.285,79
	1.905.448.244.667,64	175.138.711.309,18	79.851.364.189,00	74.239.166.518,00	2.086.199.153.648,55
Akumulasi Penyusutan	(787.006.014.846,00)		(868.026.289.089,00)		
Jumlah	1.118.442.229.821,64	175.138.711.309,18	(788.174.924.901,00)	74.239.166.248,00	1.218.172.864.562,45

Mutasi Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	1.118.442.229.821,64
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	175.138.711.309,18
Extracomptable	Rp	(1.443.806.727,00)
Belanja Modal yang tidak Masuk Ke dalam Kategori Aset	Rp	(836.545.277,00)
Hibah Kepada Pihak Ketiga	Rp	(2.985.422.733,00)
Penambahan dari Belanja Modal		<u>169.872.936.524,00</u>

Koreksi tambah terdiri :

- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	Rp	
- Hibah	Rp	74.830.000,00
- Dari Dana BOS	Rp	11.985.155.400,00
- Koreksi pencatatan	Rp	2.863.794.638 ,00
- Kapitalisasi dari Dana Tidak Terduga	Rp	10.869.000,00
- Reklasifikasi	Rp	4.790.978.000,00
- Mutasi (Perpindahan status Penggunaan)	Rp	48.814.424.764,00
- Hutang Belanja Kepada Pihak Ke-3	Rp	2.587.162.000,00
	Rp	8.724.150.387,04
Jumlah Koreksi tambah	Rp	<u>79.851.364.190,04</u>
Akumulasi Penyusutan	Rp	(868.026.289.089,00)
Jumlah	Rp	(788.174.924.898,96)

Koreksi Kurang terdiri :

- Hibah dr Aset tahun sebelumnya	2.214.451.250,00
- Lelang	426.200.000,00
- SK Penghapusan	12.269.858.600,00
- Mutasi (Pindah status Penggunaan)	2.587.162.000,00
- Reklasifikasi	51.466.443.238,41
- Koreksi Pencatatan aset dibawah 1 jt	9.276.638,00
Jumlah Koreksi Kurang	68.973.391.726,41
Saldo per 31-12- 2016	Rp 1.218.172.864.562,45

Penjelasan Mutasi aset tetap selama tahun 2016 sebagai berikut :

- 1). Mutasi tambah aset merupakan perolehan Aset Tetap melalui pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, maupun pertambahan yang diperoleh dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pertambahan aset dari belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi karena memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap.

- a. Penambahan

Penambahan di peroleh dari Realisasi Belanja Modal selama tahun anggaran 2016 yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp175.138.711.309,18, dalam pencatatan, pengakuan penambahan Aset Tetap hanya sebesar Rp169.872.936.524,00, sedangkan yang tidak dapat diakui sebagai penambahan aset adalah sebesar Rp5.265.774.738,00 (*lampiran 4*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset Tetap sebesar Rp836.545.277,00, antara lain terdiri dari Barang Habis Pakai pada dinas Kesehatan Kota Ternate sebesar Rp43.659.000,00 dan belanja modal yang digunakan bagi monitoring dan evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk penyusunan program kegiatan tahun berikutnya sebesar Rp792.886.277,00 (*lampiran5*).
2. Penambahan aset yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan Aset Tetap adalah nilai perunitnya Rp1.000.000 (*extracomptable*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi sebesar Rp1.443.806.727,00
3. Belanja modal yang dihibah berupa Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan,serta Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate ke sekolah swasta sebesar Rp2.985.422.733,00. (*lampiran 6*)

- b. Koreksi Tambah

Koreksi tambah Aset tahun 2016 sebesar Rp78.210.764.189,00 berasal dari :

- Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi kedalam belanja modal karena memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset berupa pembuatan pagar pada Dinas Koperasi Kota Ternate sebesar Rp74.830.000,00 .
- Penerimaan Hibah sebesar Rp11.985.155.400,00 yang terdiri dari :
 1. Hibah Tanah senilai Rp6.825.205.400 dari Pemerintah Halmahera Barat sesuai Berita Acara Hibah Berdasarkan Berita acara Serah Terima

nomor: 2012/180.1/B-A/2016 dan nomor: 030/343/B-A/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

2. Hibah Gedung dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp4.725.120.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima nomor: 2012/180.1/B-A/2016 dan nomor : 030/343/B-A/2016 tanggal 15 Agustus 2016
 3. Hibah Peralatan mesin senilai Rp434.830.000,00 dengan rincian :
 - Sekretariat Daerah Rp8.885.000,00;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp8.855.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp417.120.000,00
 - Koreksi tambah Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp2.863.794.638,00 berupa :
 - Peralatan Mesin sebesar Rp1.878.522.730,00
 - Gedung dan Bangunan Rp14.500.000,00
 - Aset Tetap Lainnya Rp970.771.908,00
 - Koreksi tambah Pencatatan sebesar Rp10.869.000,00 yaitu koreksi pencatatan atas Peralatan dan Mesin pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebesar Rp870.000,00 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Ternate sebesar Rp9.999.000,00.
 - Koreksi tambah dari Kapitalisasi Dana Tidak Terduga sebesar Rp4.790.978.000,00 berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
 - Koreksi tambah dari Reklasifikasi sebesar Rp48.814.424.764,00 terdiri dari :
 - Reklasifikasi tanah senilai Rp1.978.100.000,00
 - Peralatan dan Mesin Rp1.307.288.180,00
 - Gedung dan Bangunan Rp13.498.633.415,00
 - Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp5.099.613.717,00
 - Aset Tetap Lainnya Rp2.843.350.732,00
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp24.087.438.720,00
 - Koreksi Tambah karena Mutasi (Pergantian Status Penggunaan) sebesar Rp 2.587.162.000,00 terdiri dari :
 - Tanah sebesar Rp420.000.000,00
 - Peralatan dan Mesin Rp18.040.000,00
 - Gedung dan Bangunan Rp2.149.122.000,00
 - Koreksi tambah dari Hutang Belanja pada pihak ketiga sebesar Rp8.970.165.672,00, yang diakui sebagai penambahan aset adalah sebesar Rp8.724.150.387,00 sedangkan sebesar Rp194.460.285,00 adalah aset yang tidak dapat dikapitalisasi karena nilai satuan minimum aset per unit dibawah Rp1.000.000,00 dan sebesar Rp51.555.000,00 adalah barang habis pakai.
- c. Koreksi Kurang
- Koreksi Kurang Aset Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 sebesar Rp68.973.391.726,41 yaitu :
- Hibah dari aset tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan Nasional kepada Sekolah swasta sebesar Rp2.214.451.250,00
 - Koreksi Kurang atas penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah 4(empat) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat),dengan nilai perolehan 3 (tiga) unit kendaraan yang masih tercatat sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp426.200.000,00, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sudah tidak tercatat yaitu DG 47 KT dengan nilai perolehan sebesar Rp156.800.000,00. Disamping itu terdapat 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilelang pada tahun 2015 dan tercatat sebagai piutang pelunasan pembayarannya dilakukan pada tahun 2016 sebesar Rp52.500.000,00,.
 - Koreksi kurang aset tetap karena Penghapusan adalah sebesar Rp12.269.858.600,00, terdiri atas penghapusan bangunan gedung sebesar

Rp12.266.558.600,00,yaitu penghapusan bangunan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate sebesar Rp1.518.000.000,00,berdasarkan Keputusan Walikota Ternate nomor : 211/III.3/KT/2016 tanggal 15 Desember 2016,dan penghapusan bangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp2.242.651.600,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate nomor: 212/III.3/KT/2016 tanggal 15 Desember 2016, dan penghapusan bangunan gedung Pasar Gamalama Ternate sebesar Rp7.930.000.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate nomor: 210/III.3/KT/2016 tanggal 9 Agustus 2016, serta penghapusan bangunan gedung kantor Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan dan bangunan gedung Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp575.907.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate nomor: 230/III.3/KT/2016 tanggal 30 Desember 2016,dan penghapusan belanja modal tahun 2015 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp3.300.000,00 berupa 1(satu) bh miniatur perahu kora kora sesuai Keputusan Walikota Ternate Nomor 214/III.3/KT/2016 tanggal 15 Desember 2016.

- Koreksi kurang Perpindahan status Penggunaan penghapusan bangunan gedung aset antar SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp2.587.162.000,00, terdiri dari Perpindahan status penggunaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.090.413.000 dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Ternate Selatan,Kecamatan Pulau Ternate dan Kecamatan Pulau Hiri.
Perpindahan status penggunaan peralatan mesin berupa kendaraan Roda 2 (dua) dari Sekretariat Daerah Ke Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp18.040.000.
Perpindahan status penggunaan Tanah sebesar Rp1.016.109.000,00,dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp420.000.000,00 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
Perpindahan status penggunaan gedung dan bangunan yang harus dikapitalisasi keaset induknya berupa perencanaan pasar Sasa pada Dinas Pekerjaan Umum dikapitalisasi ke gedung dan Bangunan pada dinas Perindag sebesar Rp42.600.000.
- Koreksi kurang karena Reklasifikasi sebesar Rp51.466.443.241,00, terdiri dari reklasifikasi tanah sebesar Rp4.683.870.020,00, Peralatan dan Mesin Rp707.918.280,00,Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.118.947.792,00, Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.322.255.280,00 serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.633.451.869,00.
- Koreksi pencatatan aset dibawah Rp1.000.000,00 sebelum tahun 2008 yang masih tercatat di Neraca sehingga dilakukan koreksi kurang sebesar Rp9.276.638,00

Penjelasan Mutasi Aset tahun 2016 sebagai berikut :

(1) Tanah:

Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	228.381.464.460,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	5.739.946.020,00
Koreksi tambah :	Rp	9.223.305.400,00
Koreksi Kurang :	Rp	(5.103.870.020,00)
Saldo per 31-12- 2016	Rp	238.240.845.860,00

Mutasi Aset Tetap Tanah diperoleh dari :

1). Penambahan

Realisasi belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp5.739.946.020,00 yang diakui sebagai penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.370.700.000,00 dari pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pada Sekretariat Daerah sebesar yang diperuntukkan untuk tanah kantor, jalan dan fasilitas lain termuat pada lampiran 7. Sedangkan yang tidak diakui sebagai penambahan aset tanah sebesar Rp2.369.246.020,00 adalah pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.763.440.020,00, yang sesungguhnya adalah Pembuatan jembatan, Pelaksanaan kegiatan Pengadaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp558.306.000,00, adalah pembuatan gazebo diobjek wisata batu angus, serta pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Pulau Ternate Rp47.500.000,00 adalah berupa pembuatan halaman parkir.

2). Koreksi Tambah

Koreksi tambah Tanah sebesar Rp9.223.305.400,00 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi bertambah sebesar Rp1.978.100.000 pada Dinas Pekerjaan Umum adalah dari aset bangunan Gedung yang dipersiapkan untuk pembangunan Rusunawa.
- b. Hibah masuk dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang diakui pada Sekretariat Daerah dan dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp6.825.205.400,00
- c. Mutasi dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Sebesar Rp420.000.000,00

3). Koreksi Kurang

- a. Koreksi kurang aset tetap tanah sebesar Rp5.103.870.020,00 karena reklasifikasi aset tanah yang dikerjasamakan dengan PT. Yuseda Mandiri Utama untuk pembangunan SPBU pada dinas Pekerjaan Umum Rp2.314.624.000,00 ke aset lain-lain dan karena reklasifikasi aset tanah yang sebenarnya bukan aset tanah pada dinas Perhubungan Rp1.763.440.020,00 dan pada dinas Pariwisata sebesar Rp 558.306.000,00 karena bukan aset tanah tapi pengadaan Gedung dan Bangunan, dan kantor kecamatan Pulau ternate adalah pembuatan halaman parkir sebesar Rp47.500.000,00.
- b. Perpindahan status penggunaan dari Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan politik sebesar Rp420.000.000 ke kantor Arsip dan perpustakaan daerah

Jumlah bidang Tanah Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 608 bidang tanah dengan nilai sebesar 238.240.845.860,00, berupa tanah kosong/lapangan, tanah untuk gedung dan bangunan, tanah untuk konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah sekitar daerah irigasi, yang telah bersertifikat sebanyak 107 bidang tanah, dan yang belum bersertifikat sebanyak 501 bidang tanah. Terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat proses sertifikasinya dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

2 Peralatan dan Mesin

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	175.889.138.535,35
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	23.762.118.644,36
Koreksi tambah :	Rp	6.516.038.505,00
Koreksi Kurang :	Rp	(3.093.664.680,00)
Akumulasi Penyusutan	Rp	(123.694.798.041,00)
Saldo per 31-12- 2016	Rp	79.378.832.963,71

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin yaitu :

1). Penambahan

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2016, berasal dari Pelaksanaan kegiatan berupa belanja modal selama tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp23.762.118.644,36, yang diakui sebagai penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp22.311.810.868,00, tidak diakui karena tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (extracomptable) sebesar Rp1.406.648.728, dan sebesar Rp43.659.000 adalah barang habis pakai.

2). Koreksi Tambah

Koreksi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.516.038.505,00 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi bertambah sebesar Rp1.307.288.180,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Dinas Tata Kota dan Pertamanan sebesar Rp726.286.000,00 adalah reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp70.000.000,00, dan dari Jalan Irigasi dan jaringan sebesar Rp656.286.000,00
 - ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp354.942.000,00, reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin (*lampiran 8*).
 - iii. Dinas Pasar sebesar Rp199.400.000,00 reklasifikasi bertambah dari aset gedung dan bangunan berupa bak sampah.
 - iv. Badan Lingkungan hidup sebesar Rp9.810.180,00 reklasifikas dari Jalan, jaringan ke Peralatan Mesin berupa mesin genset.
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp1.850.000,00 adalah reklasifikasi berupa alat komunikasi.
 - vi. Sebesar Rp15.000.000,00 pada kantor kecamatan Ternate Utara reklasifikasi dari gedung dan bangunan berupa sekat ruangan.
- b) Penerimaan Hibah sebesar Rp434.830.000,00, rincian sebagai berikut :
 - i. Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) sebesar Rp417.120.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BA.31.5/29-11/P/BNPB/2014 tanggal 29 Nopember 2014
 - ii. Pengakuan hibah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Ternate, yang berasal dari Belanja modal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa 2 (dua) unit laptop yang diberikan sebagai penghargaan/hadiah terhadap SKPD terbaik dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015, sesuai Keputusan Walikota Ternate Nomor : 142 / II.4 / KT / 2016 tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp 17.710.000,00
- c) Koreksi tambah sebesar Rp1.878.522.730,00, pada Dinas Pendidikan Nasional berupa peralatan dan mesin yang merupakan perolehan aset dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- d) Mutasi pindah status Penggunaan kendaraan Roda 2 (dua) dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate sebesar Rp 18.040.000,00 , berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor : 02/K-I/DP-KT/2015, tanggal 12 Januari 2015
- e) Koreksi Pencatatan sebesar Rp10.869.000,00 dijelaskan sebagai berikut :
 - Koreksi pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yaitu sebesar Rp870.000,00 yang merupakan selisih antara aset tetap yang diakui pada tahun 2016 sebesar Rp1.770.000,00 dengan aset extracomptable yang diakui sebagai aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp900.000,00

- Koreksi pencatatan penambahan aset pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp9.999.000,00 dari belanja barang dan jasa tahun 2014 berupa 1(satu) unit Laptop sebesar Rp6.699.000,00 dan 1(satu) unit handycame sebesar Rp3.300.000,00.
- f) terdapat Penambahan aset dari hutang belanja berupa peralatan mesin sebesar Rp2.866.488.595,pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.220.000,00; Dinas Tata Kota dan Pertamanan sebesar Rp1.186.416.000,00;Dinas Kesehatan sebesar Rp764.158.160,00; Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp651.265.000,00;Kantor Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp54.906.435,00;Dinas Pertanian sebesar Rp101.145.000,00 dan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp103.378.000,00

3) Koreksi Kurang

Koreksi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.643.356.952,00 adalah mutasi kurang karena Reklasifikasi, pindah status penggunaan, Lelang Aset Kendaraan yang dihapuskan,Hibah dan koreksi pencatatan.

- a) Reklasifikasi Sebesar Rp707.918.280,00 terdiri dari reklasifikasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp425.624.180,00, pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp23.453.100,00, Dinas Pendapatan sebesar Rp197.000.000 ,pada Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Rp1.850.000,00 Kecamatan Ternate Utara Rp14.999.000,00 Kecamatan Hiri Rp 20.000.000,00 dan BP2TSP sebesar Rp24.992.000,00
- b) Pindah status penggunaan,yaitu mutasi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dari Sekretariat Daerah ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah berupa 1 (satu) unit sebesar Rp18.040.000,00 sesuai Berita Acara Mutasi Barang nomor 02/K-I/DP-KT/2015, tanggal 12 Januari 2015.
- c) Pada tahun 2015 terdapat 4 (empat) unit kendaraan bermotor yang dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah sebesar Rp426.200.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 131/II.4/KT/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 178/II.4/KT/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, akan tetapi baru dilakukan pemindahtanganan melalui lelang terbatas pada tahun 2016.
- d) Koreksi Kurang berupa hibah sebesar Rp478.622.034,00 pada Dinas Pendidikan Nasional ke sekolah swasta di Kota Ternate berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp171.223.333,00, dan alat-alat laboratorium Rp307.398.650,00
- e) Pada tahun 2016 terdapat penghapusan aset tetap di Dinas Pariwisata sebesar Rp3.300.000,00 yaitu belanja modal tahun 2015 berupa 1 (satu) unit miniatur perahu kora-kora yang diserahkan kepada Kementerian Pariwisata RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang nomor 556/340.A/XI/2015 tanggal 21 Nopember 2015 akan tetapi masih tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Ternate, sehingga pada tahun 2016 dilakukan penghapusan berdasarkan keputusan Walikota Ternate Nomor 214/III.3/KT/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- f) Koreksi pencatatan aset yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi dibawah tahun 2008 sebesar Rp9.276.638,00

3. Gedung dan Bangunan

Mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	769.423.321.241,46
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	58.631.424.443,64
Koreksi tambah :	Rp	24.841.000.588,00
Koreksi Kurang :	Rp	41.282.135.342,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(376.029.265.518,00)
Saldo per 31-12- 2016	Rp	435.584.345.413,10

Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan diperoleh dari :

1). Penambahan

Penambahan Gedung dan Bangunan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp58.631.424.443,64, diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Belanja Modal selama tahun 2016, dan yang diakui sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp56.085.836.493,64 sedangkan sebesar Rp63.426.950,00 pada Dinas Pekerjaan Umum tidak dapat diakui sebagai penambahan aset karena dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi jalan untuk penggaran tahun berikutnya, dan sebesar Rp2.482.161.000 pada Dinas Pendidikan Nasional diserahkan kepada sekolah swasta serta sebesar Rp37.158.000,00 pada Dinas Kesehatan adalah aset yang tidak memenuhi batas kapitalisasi dan bukan merupakan Gedung dan Bangunan, tetapi Peralatan Mesin yang penganggarannya melekat pada belanja Gedung dan Bangunan.

2). Koreksi Tambah

Koreksi tambah nilai aset gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp24.841.000.588,00, terdiri dari :

- a) Koreksi tambah berupa reklasifikasi sebesar Rp13.498.633.415,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penambahan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi aset jaringan jalan, Irigasi berupa bangunan air pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp773.470.683,00
 - Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.418.217.632,00, yaitu pada Dinas Kesehatan dan sebesar Rp5.940.786.000,00 pada Dinas Pendidikan Nasional serta sebesar Rp4.784.400.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.453.100 berasal dari reklasifikasi aset peralatan dan mesin pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa pemasangan vinyl lantai gedung kantor.
 - Penambahan Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi pengadaan tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sebesar Rp558.306.000,00 pada Dinas Pariwisata berupa pembangunan gazebo dan shalter objek wisata batu Angus dan Tolire.
- b) Hibah Gedung dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2016, sebesar Rp4.725.120.000,00 adalah penambahan berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 2012/180.1/b-a/2016 dan 030/343/b-a/2016 tanggal 15 agustus 2016 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.707.250.000,00 dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.017.870.000.
- c) Pada Dinas Pendidikan Nasional terdapat penambahan Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Belanja operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp14.500.000,00, berupa pembuatan pintu pagar besi SMPN 4 Ternate.
- d) Penambahan Nilai dari perpindahan penggunaan status Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp2.149.122.000,00, yaitu Rp1.016.109.000,00 dari Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat ke Kantor Arsip dan Perpustakaan, dan dari Sekretariat Daerah sebesar Rp1.090.413.000,00 ke Kantor Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp492.722.902,00, ke Kantor kecamatan Pulau Ternate adalah sebesar Rp315.125.842,00 dan ke Kantor Kecamatan Pulau Hiri Rp282.564.256,00 serta kapitalisasi biaya perencanaan Pasar Sasa dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp42.600.000 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena Pengakuan Aset induk Gedung dan Bangunan Pasar Sasa tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e) Penambahan Nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.830.000,00 dari belanja Barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagai penambahan aset pada Dinas Koperasi berupa pembuatan pagar.

- f) Terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan dari hutang belanja sebesar Rp4.378.795.173,00.

3). Koreksi Kurang

Koreksi kurang nilai aset Gedung dan Bangunan selama tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp38.699.389.392,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi berkurang dilakukan sebagai akibat penyesuaian kelompok/jenis aset dan penyesuaian Gedung dan Bangunan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 penyelesaian pembangunan belum selesai atau belum digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sebesar Rp22.118.947.792,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya yaitu Aset Renovasi dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Ternate Tengah berupa Kantor lurah Maliaro dan kantor lurah Takoma sebesar Rp423.130.000,00
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.928.248.185,00 pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu direklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp133.446.585,00, dan direklasifikasi ke aset Tanah sebesar Rp1.978.100.000,00 dan direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.141.671.600,00 serta sebesar Rp1.675.030.000,00 direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.
 - Reklasifikasi sebesar Rp70.000.000,00 pada Dinas Tata Dinas Kota dan Pertamanan dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Peralatan Mesin berupa fasilitas pendukung Taman Nukila.
 - Reklasifikasi sebesar Rp752.465.732,00 pada Dinas Kesehatan dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp354.942.000,00 dan sebesar Rp397.523.732,00 ke Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi.
 - Reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.415.661.000,00 pada Dinas Pendidikan Nasional direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.376.150.000 dan sebesar Rp39.511.000,00 direklasifikasi ke Jalan, jaringan dan Irigasi.
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.811.740.000,00 berupa pembangunan Kantor Dinas Tenaga kerja dan Sosial direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.646.875,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan di reklasifikasi ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi.
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.874.000,00 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di reklasifikasi ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi.
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp713.547.000,00 pada Dinas Pasar keaset Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.400.000,00 dan keaset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp514.147.000,00.
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.000.000,00 pada Kecamatan Ternate Utara direklasifikasi ke aset Peralatan dan Mesin
 - Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.860.000,00 pada Kecamatan Pulau Hiri direklasifikasi keaset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan gedung kantor.
 - Reklasifikasi ke aset tetap lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Rp97.500.000,00, Dinas Perhubungan Rp165.500.000,00, Dinas Koperasi dan UKM Rp59.675.000,00 serta sebesar Rp1.475.100.000,00 merupakan reklasifikasi Gedung dan Bangunan tribun Gelora Kieraha ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sampai 31 Desember 2016 belum selesai pengerjaan, pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp2.149.122.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.090.413.000,00 yang terdiri dari mutasi ke Kantor Kecamatan Ternate Selatan berupa Kantor Lurah Ubo-Ubo sebesar Rp492.722.902,00, ke Kecamatan Pulau Ternate berupa Kantor Lurah Sulamadaha sebesar Rp315.125.842,00 dan Kantor Kecamatan Pulau Hiri berupa Kantor Lurah Faudu sebesar Rp282.564.256, serta

kapitalisasi biaya perencanaan Pasar Sasa dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp42.600.000 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena Pengakuan Aset induk Gedung dan Bangunan Pasar Sasa tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- c. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.164.761.000,00 dari Dinas Pendidikan Nasional kesekolah swasta di Kota Ternate (*lampiran 9*).
- d. Pada Tahun 2016 terdapat penghapusan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp12.266.558.600,00 terdiri dari :
 - penghapusan Gedung dan Bangunan kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 212/ III.3/KT/2016, tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp2.242.651.600,00
 - penghapusan Gedung dan Bangunan kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial Kota Ternate berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 211/ III.3/KT/2016, tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp1.518.000.000,00
 - penghapusan Gedung dan Bangunan Pasar Gamalama Ternate berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 210/III.3/KT/2016 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp7.930.000.000,00
 - penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp575.907.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 230/III.3/KT/2016 tanggal 30 Desember 2016 yaitu penghapusan Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp427.140.000,00 dan penghapusan Gedung dan Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp148.767.00,00.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	672.068.213.240,04
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	86.531.882.801,18
Koreksi tambah :	Rp	10.775.842.337,04
Koreksi Kurang :	Rp	10.051.714.607,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(368.302.225.530,00)
Saldo per 31-12- 2016	Rp	391.021.998.241,26

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan diperoleh dari :

1). Penambahan

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pelaksanaan program kegiatan dari belanja modal sebesar Rp86.531.882.802,00, akan tetapi yang diakui sebagai penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp85.802.423.475,00, oleh karena terdapat kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp729.459.327,00 bukan merupakan penambahan aset karena dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi jalan guna penganggaran tahun berikutnya.

2). Koreksi Tambah

Koreksi tambah aset sebesar Rp10.775.842.336,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi tambah sebesar Rp5.099.613.717,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.623.494.822,00 berupa penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.490.048.237,00 dan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa pembuatan trotoar sebesar Rp133.446.585,00.
 - reklasifikasi tambah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.763.440.020,00 dari aset tanah yang pelaksanaan program kegiatan merupakan pembuatan jembatan dikelurahan Tadenas sebesar Rp820.610.00 dan

pembuatan jembatan dikelurahan Takofi Kecamatan Moti sebesar Rp427.780.020 serta pembuatan jembatan dipantai Sake Kecamatan Hiri sebesar Rp515.050.000,00,

- reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp39.511.000,00, berupa saluran pembuangan air; dan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp28.646.875,00, berupa pembuatan jalan/Paving blok; pada BP4K sebesar Rp62.874.000,00 berupa pembuatan jalan lingkungan; pada Dinas Pasar untuk pembuatan saluran air dan pemasangan paving blok sebesar Rp 514.147.000,00; pada Kantor Kecamatan Pulau sebesar Rp47.500.000,00; berupa pembuatan halaman parkir dan pada Kantor Kecamatan Hiri sebesar Rp20.000.000,00 berupa pemasangan instalasi listrik.
- b. Koreksi tambah dari Dana Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.790.978.000 berupa pembuatan talud (*lampiran 9*).
- c. Pertambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp885.250.619,00 diperoleh dari hutang belanja karena sampai berakhirnya tahun anggaran 2016, masih terdapat kewajiban kepada Pihak ketiga yang belum terbayarkan yaitu hutang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp371.163.000,00 dan pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sebesar Rp514.087.619,00.

3). Koreksi Kurang

Koreksi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp9.322.255.280,00 dengan rincian sebagai berikut :

- pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8.656.159.100,00, terdiri koreksi kurang jalan karena direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebesar Rp6.714.287.700,00, dan koreksi kurang bangunan air/ irigasi sebesar Rp1.941.871.400,00 direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp1.168.400.717,00, serta direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp773.470.683,00.
- Koreksi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan sebesar Rp656.286.000,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa pengadaan lampu hias dekoratif, dan koreksi kurang sebesar Rp9.810.180,00 pada Badan Lingkungan Hidup direklasifikasi ke Peralatan Mesin berupa genset.

5. Aset Tetap Lainnya

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	20.176.327.756,09
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	473.339.400,00
Koreksi tambah :	Rp	4.407.738.640,00
Koreksi Kurang :	Rp	74.330.000,00
Saldo per 31-12- 2016	Rp	24.983.075.796,09

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

1) Penambahan

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Pelaksanaan kegiatan belanja modal tahun 2016 senilai Rp473.339.400,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp399.009.400,00, terdiri dari penambahan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan sebesar Rp299.046.000,00, yang terdiri dari pembuatan sekat ruangan sebesar Rp149.700.000,00, pembuatan Peta Dasar sebesar Rp84.452.000,00 pengadaan foto citra

satelit sebesar Rp64.894.000,00, dan penambahan Aset Tetap Lainnya berupa buku pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp99.963.400,00, dan yang tidak diakui sebagai penambahan aset sebesar Rp74.330.000,00 pada Dinas Pendidikan Nasional berupa pengadaan buku yang diserahkan ke perpustakaan swasta.

2) Koreksi Tambah

Koreksi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.407.738.640,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koreksi tambah reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.843.350.732 terdiri dari reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp423.130.000,00; dan pada Dinas Pekerjaan Umum Rp1.772.530.000,00, berupa kegiatan rehabilitasi lanjutan eks Kantor Gubernur Maluku Utara Rp1.675.030.000,00 dan rehabilitasi Gedung Ngaralamo Rp97.500.000,00, pada Dinas Perhubungan Rp165.500.000,00, pada Dinas Koperasi dan UKM Rp59.675.000,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp397.523.732,00 berupa Aset Renovasi dan reklasifikasi dari aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada BP2TSP sebesar Rp24.992.000,00, berupa Aset Renovasi.
- Koreksi tambah sebesar Rp970.771.908,00 pada Dinas Pendidikan Nasional berupa buku dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa buku dari hutang belanja pada Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp593.616.000,00

3) Koreksi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp74.330.000,00 pada Dinas Pendidikan Nasional berupa hibah buku kepada Sekolah Swasta di Kota Ternate.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01- 2016	Rp	39.509.779.434,79
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016	Rp	00
Koreksi tambah :	Rp	24.087.438.720,00
Koreksi Kurang :	Rp	14.633.451.866,41
Saldo per 31-12- 2016	Rp	48.963.766.288,38

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari :

1) Penambahan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp48.963.766.285,79, Konstruksi Dalam Pengerjaan timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi dan belum ada Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari pihak ketiga kepada Pengguna Barang dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

No	NAMA SKPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per- 31 Desember 2016 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	41.227.573.991,79
2.	Dinas Pendidikan Nasional	1.376.150.000,00
3.	Dinas Perhubungan	300.228.705,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	3.811.740.000,00
5.	Kantor Kecamatan Batang Dua	605.400.000,00
6.	Kantor Kecamatan Hiri	167.573.590,00
7.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.475.100.000,00
	Jumlah	48.963.766.288,38

2) **Koreksi Tambah**

Koreksi tambah aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari reklasifikasi adalah sebesar Rp24.087.438.720,00, yaitu pada:

Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp17.024.360.015,00, dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.141.671.600 dan dari Jalan sebesar Rp6.714.287.700. dari Bangunan air dan Irigasi sebesar Rp1.168.400.715,00

Dinas Kesehatan sebesar Rp300.228.705,00, reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

Dinas Pendidikan sebesar Rp1.376.150.000,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebesar Rp3.811.740.000,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp99.860.000 dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi tambah dari Gedung dan Bangunan berupa tribun Gelora Kieraha pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.475.100.000

Daftar realisasi belanja Modal yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2016 :

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Realisasi Belanja s/d 31 Desember 2016 (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	300.228.705,00
2.	Bangunan Kantor	3.911.600.000,00
3.	Bangunan Lainnya	10.310.072.315,00
4.	Gedung Sekolah	2.851.250.000,00
5.	Jalan	6.714.287.700,00
	Jumlah	24.087.438.720,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan termuat dalam lampiran 10.

3) **Koreksi Kurang**

Koreksi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2016 adalah sebesar Rp14.633.451.869,00, merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi Gedung dan Bangunan telah selesai.

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai sebagai berikut :

No	NAMA SKPD	per 31 Des 2016
1	Dinas Pekerjaan Umum 1. Jalan kepelabuhan Jikomalamo 2. Jalan Lingkungan Kelurahan Jati (baru) 3. Pembuatan jembatan Foramadiah II	2.490.048.237,00 1.929.069.000,00 233.150.040,00 327.829.197,00
2.	Dinas Kesehatan Pembangunan Ruang Perawatan Puskesmas Jambula	1.418.217.632 5.940.786.000
3	Dinas Pendidikan Nasional (daftar Terlampir)	5.940.786.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gedung Kantor	4.784.400.000,00

4) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali Hewan, Tanaman, dan Buku Perpustakaan). Berikut rincian akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2016:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.694.798.041,00	109.152.945.281,00
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	376.029.265.518,00	359.293.619,525,00
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	368.302.225.530,00	318.559.450.040,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	20.176.327.762,00
	J u m l a h	868.026.289.089,00	787.006.014.846,00

Apabila disandingkan nilai perolehan Aset Tetap, maka akan diperoleh Nilai Buku untuk masing-masing Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

(dalam rupiah)		
Tanah		238.240.845.860,00
Peralatan dan Mesin	203.073.631.004,71	
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	<u>(123.694.798.041,00)</u>	
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		79.378.832.963,71
Gedung dan Bangunan	811.613.610.931,10	
Akum Peny. Gedung dan Bangunan	<u>(376.029.265.518,00)</u>	
Nilai Buku Gedung dan Bangunan		435.584.345.413,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	759.324.223.771,26	
Akum Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>(368.302.225.530,00)</u>	
Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan		391.021.998.241,26
Aset Tetap lainnya	24.983.075.796,00	
Akum Peny. Aset tetap lainnya	<u>0,00</u>	
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya		24.983.075.796,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		48.963.766.288,38
Total Aset Tetap		1.218.172.864.562,45

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan Aset Tetap dapat di informasikan sebagai berikut :

1. Terdapat Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang dihibah oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kota Ternate berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor : 2012/180.1/b-a/2016 dan 030/343/b-a/2016 tanggal 15 agustus 2016 sebanyak 25 (dua Puluh lima) bidang tanah dan bangunan. Dari 25 Bidang tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Halmahera Barat, 19 bidang tanah dan bangunan telah dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Ternate dilakukan penyerahan secara resmi, sehingga penambahan pencatatan dalam tahun 2016 hanya 6(enam) bidang tanah senilai Rp6.825.205.400,00 dan 4(empat) unit gedung bangunan senilai Rp4.725.120.000.00, dan masih tersisa 2 (dua) unit gedung bangunan yang belum memiliki nilai sampai dengan 31 Desember 2016.
2. Nilai dan Jumlah bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam aset tetap tanah belum termasuk nilai dan bidang tanah yang diperuntukkan sebagai Jalan dan badan jalan.
3. Terdapat 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dengan nomor polisi DG 280 KT dan DG 148 KT tercatat sebagai piutang karena telah dilelang pada tahun 2015, akan tetapi pelunasan pembayaran baru dilakukan pada tahun 2016 sebesar Rp Rp52.500.000,00.
4. Pemeriksaan LKPD tahun 2015 terdapat temuan aset kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.122.512.377,45, tindak lanjut dari temuan tersebut yaitu telah diketahui keberadaannya sebesar Rp47.750.000,00, sehingga sisa temuan aset kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan laporan ini adalah sebesar Rp1.074.762.377,45.
5. Pemeriksaan LKPD tahun 2015 terdapat temuan aset tetap kendaraan bermotor yang dikuasi oleh pihak lain sebesar Rp2.218.555.866,00, dari total nilai temuan tersebut telah ditindak lanjuti sebesar Rp600.275.000,00 sehingga sisa temuan aset tetap kendaraan bermotor yang belum ditindak lanjuti sampai laporan ini sebesar Rp1.618.280.866,00.
6. Pemeriksaan LKPD tahun 2015 terdapat temuan pemberian miniatur perahu kora-kora dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa 1 (satu) unit sebesar Rp3.300.000,00 kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, tanpa Berita Acara Serah Terima. Pelaksanaan tindak lanjut temuan tersebut yaitu dengan melengkapi Berita Acara Serah Terima nomor 556/340.A/XI/2015 tanggal 21 Nopember 2015, dan telah dilakukan penghapusan dari daftar Barang Inventaris Milik Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 214/III.3/KT/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penghapusan 1 (satu) miniatur perahu Kora-kora Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Ternate.

VI.8.1. Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp **47.986.297.787,00** terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
- Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi	-	413.499.567,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	32.189.170.000,00	29.874.546.000,00
- Aset Tak Berwujud	1.505.172.155,00	568.142.858,00
- Akumulasi Penyusutan	(754.377.665,00)	
- Aset Lain-lain	41.064.493.413,00	40.967.519.713,65
- Akumulasi Penyusutan	(26.192.260.116,00)	
- Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	174.100.000,00	174.100.000,00
Jumlah	47.986.297.787,00	71.997.808.138,65

1. Kemitraan dengan pihak ketiga.

Pos Kemitraan dengan pihak Ketiga terdiri dari nilai Aset milik Pemerintah Kota Ternate yang diperuntukkan bagi Pembangunan Waterboom kerjasama dengan PT. Indoteranusa, PT. Jati Luhur Gemilang dan PT. Sumber Arta Bahari Sejahtera. Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Ternate dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

No.	Aktiva Bangun Guna Serah	AKTIVA YANG DIAKUI (Rp.)		KETERANGAN
		Bangunan	Tanah Rp.	
1.	<u>Bangunan Waterboom</u>		3.350.000.000,00	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Indoteranusa dengan masa Pengembalian 30 tahun
2	<u>Mall JatiLand</u>		26.524.546.000,00	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate yang telah memiliki Sertifikat status Hak Pengelolaan No. 01 tanggal 25 Oktober tahun 2004 seluas 38.457 M2 dan diatas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT. Jati Luhur Gemilang No. 26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2 - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Jatiluhur Gemilang dengan masa Pengembalian 25 tahun
3.	Hypermart		2.314.624.000	- Bangunan dibangun dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dengan PT. Sumber arta Bahari Sejahtera dengan jangka waktu 30 tahun

2. Aset Tak Berwujud

Pada tahun 2016 terdapat penambahan aset tak berwujud sebesar Rp. 1.505.172.155,00. *lampiran 11*

3. Aset lain-lain

Aset Lain-lain Tahun 2016 sebesar Rp41.064.493.413,00 terdiri dari aset dalam Kondisi Rusak Berat Rp36.691.134.945, aset yang tidak diketahui keberadaannya Rp60.020.000, 00 aset hilang Rp22.832.900, 00 aset Hewan Sapi yang mati Rp29.931.000, dan aset yang rencana dihibahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.847.075.000. dan sebesar Rp.413.499.567,00 tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah.

4. Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp174.100.000,00 adalah hasil uang kas daerah yang digunakan sebagai barang bukti oleh Kejari Ternate, dan pada tanggal 16 pebruari 2017 telah dikembalikan

LAPORAN OPERASIONAL

VI.9. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada Tahun 2016 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp938.674.392.276,41.

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	70.100.803.356,41	87.900.644.210,16	(17.799.840.853,75)	(20,25)
2	Pendapatan Transfer	828.245.489.002,00	750.689.548.790,00	117.884.040.130,00	15,70
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.328.101.178,00	50.927.938,00	(50.927.938,00)	(100)
	Jumlah	938.674.393.536,41	838.641.120.938,16	100.033.271.338,25	11,93

VI.9.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp70.100.803.356,41. Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah :

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.228.957.171,00	35.834.552.508,00	5.104.116.534,00	14,24
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.329.695.972,00	15.074.693.757,00	1.255.002.215,00	8,33
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	356.500.800,00	100.231.200,00	256,269,600,00	255,68
4	Lain-lain PAD yang Sah	12.185.649.413,41	36.891.166.745,16	(24.705.517,331,75)	(66,97)
	Jumlah	70.100.803.356,41	87.900.644.210,16	10.270.125.534,95	11,68

VI.9.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2016 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Hotel - LO	3.173.351.586,00
2	Restoran - LO	7.772.014.740,00
3	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	899.124.698,00
4	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	15.674.126.422,00
5	Pajak Reklame	1.844.253.359,00
6	Pajak Parkir - LO	155.972.800,00
7	Pajak Air Tanah - LO	816.460.666,00
8	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	2.996.150.122,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	4.541.874.879,00
10	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	3.355.627.899,00
	JUMLAH	41.228.957.171,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas Pajak 2016 Kota Ternate dengan realisasi sebesar Rp41.228.957.171,00, dengan kontribusi penerimaan terbesar pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2016

No	Uraian	Penerimaan Kas	Piutang	Total
1	Hotel - LO	3.173.351.586,00	2.169.110.140,00	5.342.461.726,00
2	Restoran - LO	7.772.014.740,00	1.482.892.241,00	9.254.906.981,00
3	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	899.124.698,00	11.857.625,00	910.982.323,00
4	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	15.605.825.381,00	0,00	15.605.825.381,00
5	Pajak reklame	1.844.253.359,00	70.575.294,00	1.914.828.653,00
6	Pajak Parkir - LO	155.972.800,00	0,00	155.972.800,00
7	Pajak Air Tanah - LO	816.460.666,00	108.156.484,00	924.617.150,00
8	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO	2.996.150.122,00	0,00	2.996.150.122,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	4.319.887.791,00	8.384.609.848,00	12.704.497.639,00
10	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	3.355.627.899,00	0,00	3.355.627.899,00
11	Retribusi Pelayanan pasar	0,00	59.422.000,00	59.422.000,00
12	Pajak bagi hasil Provinsi	0,00	1.557.758.828,00	1.557.758.828,00
	JUMLAH	41.228.957.171,00	13.844.382.460,00	54.783.051.502,00

VI.9.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	-
2	Tempat Pelelangan	1.350.000,00
3	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	2.537.961.000,00
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.353.100.000,00
5	Retribusi pelayanan pasar pelantara LO	(8.000.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO	1.149.753.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	5.885.471.270,00
8	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO	948.300.000,00
9	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	21.000.000,00
10-	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	319.150.100,00
11	Ruangan -LO	1.250.000,00
12	Kendaraan Bermotor - LO	87.790.000,00
13	Tempat Kegiatan Usaha - LO	214.100.000,00
14	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	294.157.000,00
15	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	109.200.000,00
16	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	159.650.000,00
17	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	411.279.000,00
18	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	1.961.634.797,00
19	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	857.203.605,00
20	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	0,00
21	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	15.045.000,00
22	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO	10.301.200,00
	JUMLAH	16.329.695.972,00

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016 sebesar Rp16.329.695.972,00.

VI.9.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp356.500.800,00, yang merupakan pembagian deviden dari PT. BPRS Bahari Berkesan.

VI.9.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah yang diterima selama tahun 2016 adalah sebesar Rp12.185.649.413,41.

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	87.500.000,00
2	Jasa Giro Kas Daerah - LO	324.145.096,02
3	Pendapatan Bunga Deposito - LO	3.226.025.760,05
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan BLH - LO	29.500.000,00
5	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	5.740.535.362,82
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	2.777.543.284,96
	Jumlah	12.185.649.413,41

VI.9.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur. Penendapatan Transfer terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Trnsfer Pemerintah Pusat	742.400.510.237,00	633.647.253.093,00	108.753.257.144,00	17,16
2	Pendapatan Trnsfer Pemerintah Pusat- lainnya	57.231.677.100,00	97.254.431.000,00	(40.022.753.000,00)	(41,15)
3	Pendapatan Trnsfer Pemerintah Daerah – lainnya	28.613.301.665,00	19.787.864.697,00	8.825.436.968,00	44,60
	JUMLAH	828.245.489.002,00	750.689.548.790,00	77.555.940.212,00	10,33

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa relisasi Pendapatan Transfer Tahun 2016 secara total mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp77.555.940.212,00.

VI.9.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Ternate pada tahun 2016 adalah sebesar Rp742.400.510.237,00.

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.215.232.041,00	15.938.728.800,00	10.276.503.241,00	60,48
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	4.902.501.196,00	15.216.237.293,00	(10.313.736.097,00)	67,78
3	Dana Alokasi Umum	621.354.106.000,00	547.124.097.000,00	74.230.009.000,00	13,57
3	Dana Alokasi Khusus	89.928.671.000,00	55.368.190.000,00	34.560.481.000,00	62,42
	JUMLAH	742.400.510.237,00	633.647.253.093,00	108.753.257.144,00	17,16

Untuk Tahun 2016, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

VI.9.2.2. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp26.215.232.041,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp15.938.728.800,00 maka nilainya lebih besar.

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	16.628.389.920,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	-
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	-
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	9.586.842.121,00
	JUMLAH	26.215.232.041,00

VI.9.2.3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realiasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2016 sebesar Rp,4.902.501.196,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp15.216.237.293,00 mengalami penurunan sebesar (Rp10.313.736.097,00) atau (67,78%). Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	0,00
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	2.567.083.567,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	1.871.042.250,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	0,00
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	452.025.539,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	0,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	12.349.840,00
	JUMLAH	4.902.501.196,00

VI.9.2.4. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2016 adalah sebesar Rp621.354.106.000,00, lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp547.124.097.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp74.230.009.000,00 (13,57%).

VI.9.2.5. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2016 adalah sebesar Rp89.928.671.000,00, lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp55.368.190.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp34.560.481.000,00 (62,42%).

VI.9.2.6. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2016 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebesar Rp57.231.677.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Penyesuaian.

VI.9.2.7. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2016 adalah sebesar Rp57.231.677.100,00 lebih Kecil bila dibandingkan dengan dana penyesuaian yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp97.254.431.000,00 atau turun sebesar Rp(40.022.753.900,00) (41,15%). Realisasi Dana Penyesuaian terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	49.198.717.100,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.652.960.000,00
3	Dana Insentif Daerah - LRA	5.000.000.000,00
4	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.380.000.000,00
	JUMLAH	57.231.677.100,00

Untuk Tahun 2016, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

VI.9.2.8. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2016 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp28.613.301.665,00.

VI.9.2.9. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp28.613.301.665,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	23.817.461.692,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	4.795.839.973,00
	JUMLAH	28.613.301.665,00

VI.10. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2016 Beban Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp818.510.771.951,44.

VI.10.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp426.265.104.531,00. Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut :

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Gaji Pegawai	333,469,767,505.00
Jaminan Kecelakaan & kematian	1,191,231,521.00
Tambahan Penghasilan	22,560,151,205.00
Tunjangan Guru	62,719,020,700.00
Tunjangan operasional Walikota & Kepala SKPD	2,065,899,600.00
Insentif Pajak dan retribusi	2,602,800,000.00
Beban Lembur	581,812,500.00
Uang Untuk Di Serahkan ke Masyarakat/Pihak Ke.3	1,074,421,500.00
JUMLAH	426,265,104,531.00

VI.10.2. BEBAN PERSEDIAAN

Beban persediaan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp51.239.440.470,50. Dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BEBAN	JUMLAH (Rp)
Beban Persediaan Pakai Habis	20.540.461.408,50
Beban Persediaan Bahan/Material	30.698.979.062,00
TOTAL	51.239.440.470,50

VI.10.3. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Jasa Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp186.525.660.651,59, dengan rincian sebagai berikut :

Beban	Jumlah
Beban Jasa Kantor	22.769.750.002,16
Beban Premi Asuransi	1.710.942.876,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.977.119.087,00

Beban	Jumlah
Beban Cetak dan Penggandaan	8.003.124.833,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.268.298.758,79
Beban Sewa Sarana Mobilitas	595.594.910,00
Beban Sewa Alat Berat	99.979.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.740.881.697,00
Beban Makanan dan Minuman	21.166.289.656,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	928.425.000,00
Beban Pakaian Kerja	775.231.000,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	710.724.000,00
Beban Jasa Konsultasi	1.665.043.826,55
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.379.641.860,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.650.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.369.965.200,00
Beban Honorarium Non Pegawai	10.450.000,00
Beban Honorarium PNS - LO	23.195.034.320,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	49.995.749.115,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.243.283.584,00
Beban Barang Dana BOS	7.320.821.679,18
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	2.772.533.977,64
Beban barang yang tidak dikapitalisasi	2.661.463.858,87
Total	166.010.348.241,19

VI.10.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp6.711.691.096,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Beban	Jumlah
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	364.109.119,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.005.715.730,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	198.200.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	99.790.336,00
Beban Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	182.290.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan LAN / WAN / Internet	78.868.111,00
Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	1732.837.800,00
Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum	49.880.000,00
Total	6.711.691.096,00

VI.10.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp56.048.672.671,82. Dengan rincian sebagai berikut :

Beban	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.439.850,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.353.698.922,00
Beban Transportasi dan Akomodasi	2.494.533.900,00
Total	56.048.672.671,82

VI.10.6. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp12.907.771.490,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 Beban Hibah Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp46.074.918.131,49 maka terjadi Penurunan cukup besar sebesar (Rp33.167.146.641,49) atau turun (71,99%) Beban Hibah pada Tahun 2016 yang terdiri dari:

Beban Hibah berupa uang yang ada di DPKAD:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PKK Kota Teranate	700.000.000.00	700.000.000.00	100
2	Dharma Wanita	500.000.000.00	500.000.000.00	100
3	Pramuka	1.044.590.000.00	1.044.590.000.00	100
4	KORPRI	750.000.000	750.000.000	100
5	KONI Kota Ternate	1.600.000.000.00	1.600.000.000.00	100
6	PMI	300.000.000.00	300.000.000.00	100
7	KNPI	200.000.000.00	200.000.000.00	100
8	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000.00	250.000.000.00	100
9	Badan Amil Zakat	600.000.000.00	600.000.000.00	100
10	Dewan Pendidikan	200.000.000.00	200.000.000.00	100
11	PGRI	200.000.000.00	200.000.000.00	100
12	MUI	150.000.000.00	0,00	0,00
13	Bantuan Operasional Penyelenggra PAUD	1.213.200.000.00	1.213.200.000.00	100
14	Persatuan Wiredatama Repoblik Indonesia	100.000.000.00	100.000.000.00	100
	Jumlah	7.807.790.000.00	7.657.790.000.00	99.84

Selebihnya dari beban yang ada d DPKAD adalah Beban barang diserahkan kepada masyarakat merupakan beban melekat pada pengeluaran SKPD Diknas . sebesar Rp5.199.873.990,00 dan lainnya Rp50.108.500,00.

VI.10.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp5.357.530.100,00, dimana nilai beban pada tahun 2016 lebih Kecil dari Tahun Anggaran 2015. Beban Bantuan Sosial seluruhnya direalisasikan untuk organisasi social kemasyarakatan dan social keagamaan dalam bentuk pengeluaran kas .

VI.10.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp89.235.216.153,00 yang terdiri dari penyusutan sebesar Rp89.121.966.437,00 dan amortisasi sebesar Rp122.822.843,00 rincian penyusutan dapat di lihat pada *lampiran 1* dan rincian amortisasi dapat dilihat pada *lampiran 2*..

VI.10.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.932.605.727,00 terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyisihan piutang pajak	1.929.244.575,00
2	Beban Penyisihan piutang lainnya	3.361.152,00
	JUMLAH	1.932.594.590,00

Adapun rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 3*.

VI.10.10. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang yang diberikan kepada Partai Politik.

Untuk Tahun 2016 Beban lain-lain Pemerintah Kota Ternate terealisasi sebesar Rp813.109.720,00.

VI.10.11. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2016, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp938.674.392.276,41 dan realisasi beban Rp818.526.345.078,44 maka Pemerintah Kota Ternate mengalami Surplus sebesar Rp120.157.621.584,97.

VI.10.12. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2016 adalah sebesar Rp2.004.401.312,00 adalah deficit penghapusan aset tetap.

VI.11. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Untuk Tahun 2016 Beban Luar Biasa realisasinya sebesar Rp754.588.500.00.

VI.12. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Ternate Tahun 2016 yaitu sebesar Rp117.389.057.385,97.

VI.13 KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2016. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.13.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Ternate dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp180.178.990.231,39 Untuk Tahun Anggaran 2016, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

VI.13.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Pajak Hotel	3.173.351.586.00
2	Pajak Restoran	7.730.596.840.00
3	Pajak Hiburan	887.267.073.00
4	Pajak Reklame	1.968.097.990.00
5	Pajak Penerangan Jalan	15.605.825.381.00
6	Pajak Parkir	155.972.800.00
7	Pajak Air Tanah	857.792.923.00
8	pajak mineral bukan logam	2.996.150.122.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	3.640.737.280.00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.355.627.899.00
J u m l a h		40.371.419.894.00

VI.13.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016
I	Retribusi Jasa Umum	11.895.585.270,00
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.537.961.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.353.100.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	7.035.224.270,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	948.300.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.000.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	1.597.926.100,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	408.190.100,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.350.000,00
2	Retribusi Terminal	214.100.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	294.157.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	109.200.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	159.650.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	411.279.000,00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	2.844.184.602,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.961.634.797,00
2	Retribusi Izin Gangguan	857.203.605,00
3	Retribusi Izin Trayek	15.045.000,00
4	Retribusi Izin Perikanan	10.301.200,00
	J u m l a h	16.337.695.972,00

VI.13.4. Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan adalah sebesar Rp356.500.800,00.

VI.13.5 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

NO	Uraian	Realisasi 2016
1	Penerimaan Jasa Giro	324.145.096,02
2	Penerimaan Bunga Deposito	3.226.025.760,05
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	29.500.000,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.827.345.827,82
	JUMLAH	9.407.016.683,89

Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat realisasi arus masuk kas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

VI.13.6 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Ralisasi 2016
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	12.193.682.090,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh	9.586.842.121,00
	JUMLAH	21.780.524.211,00

VI.13.6.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	578.636.567,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.871.042.250,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	452.025.539,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	12.349.840,00
	JUMLAH	2.914.054.196,00

VI.13.6.2. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2016 pelaporan sebesar Rp621.354.106.000,00.

VI.13.6.3. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2016 pelaporan sebesar Rp89.928.671.000.

VI.13.6.4. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	49.198.717.100,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.652.960.000,00
3	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00
4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	1.380.000.000,00
	JUMLAH	57.231.677.100,00

VI.13.6.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2016
1	PKB	3.565.838.744.00
2	BBNKB	3.249.962.194.00
3	PBBKB	8.531.062.080.00
4	P3ABT	14.801.211.00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	4.795.839.973.00
Jumlah		20.157.504.202.00

VI.13.6.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Hibah

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan di setorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan, merupakan penerimaan dalam bentuk hibah dari pemerintah Propinsi Maluku Nihil.

VI.13.6.7. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 sebesar Rp427.146.588.115,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.13.6.8. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 sebesar Rp253.381.125.492,50. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate. Selama Tahun Anggaran 2016, Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp699.660.179.827,50 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah (Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp2.777.543.194,22.

VI.13.6.9. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2016 sebesar Rp7.657.790.000,00.

VI.13.6.10. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial

Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2016 sebesar Rp5.116.000.000,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan kepada Organisasi kemasyarakatan dan Keagamaan.

VI.13.6.11. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2016 sebesar Rp5.545.566.500,00,

VI.13.6.12. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2016 sebesar Rp813.109.720,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik .

VI.13.7 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini untuk tahun 2016 tidak ada .

VI.13.7.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan Peralatan dan Mesin

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang telah dihapuskan dari Neraca melalui tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai sebesar Rp140.000.000,00.

VI.13.7.2. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2016 pelaporan dengan nilai sebesar Rp5.739.946.020,00.

VI.13.7.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Selama tahun anggaran 2016 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp23.762.118.596,08.

VI.13.7.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2016 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah sebesar Rp58.631.424.444,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor.

VI.13.7.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp86.531.882.802,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalankota.

VI.13.7.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, dan barang bercorak seni dan budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp473.339.400,00.

VI.13.7.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset pemerintahdaerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp0,00.

VI.13.7.8. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp0,00.

VI.13.7.9. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Ternate. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp3.564.051.136,00 Rincian arus kas ini terdiri dari:

VI.13.7.10. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp70.672.505.332,40 yang terdiri dari (i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.13.7.11. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp67.053.223.421,00 yang terdiri dari(i) pungutan Taperum, IWP, dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI.13.8 Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Saldo awal kas di BUD dan Kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2016 sebesar Rp.478.179.694,08. Nilai tersebut terdiri dari Kas akhir di 2015 di BUD Rp58.345.089,08 kas bendahar Pengeluaran Rp414.298.605,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.536.000,00.

VI.13.9 Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Saldo Akhir di kas di BUD dan Kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2016 sebesar Rp222.509.799,79. Yang terdiri dari Saldo akhir Kas Di BUD Rp7.849.016,79 dan Kas bendahara pengeluaran Rp42.044.283,00 dan kas Akhir Kas di bendahara Penerimaan Rp172.616.500,00 dan Kenaikan Kas Dana Kapitasi Sebesar Rp60.241.251,58.

VI.13.10 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Nilai Saldo akhir Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp172.616.500,00 merupakan saldo kas yang di bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan. Kas tersebut merupakan penerimaan retribusi persampahan yang terkumpul melalui PDAM Kota Ternate dan sampai akhir Tahun yaitu 31 Desember 2016 sisa uang belum disetor ke BUD.

VI.13.11 Total Kas

Total kas sebesar Rp15.424.644.650,63 merupakan penjumlahan dari Saldo Akhir Kas di BUD Rp7.849.016,79 dan Kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp42.044.283,00 Kas di FKTP (kas lainnya) sebesar Rp1.382.705.618,84. Dan Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp172.616.500,00.

VI.14 KOMPONEN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau deficit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

Laporan perubahan ekuitas pemerintah Kota Ternate Tahun 2016 dan 2015 dapat di sajikan pada table berikut ini :

Laporan Perubahan Ekuitas	Saldo 2016	Saldo 2015	Kenaikan /Penurunan	%
Ekuitas Awal	1.248.434.805.872,24	1.914.667.729.425,98	(666.232.923.553,74)	(34,80)
Surplus/Defisit-LO	117.389.056.845,97	45.658.428.183,56	71.730.628.662,41	(117,38)
Selisih revaluasi aset tetap	(30.845.460,00)		(30.845.460,00)	100%
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar (Netto)	(32.547.965.835,23)	(711.891.351.736,90)	(679.343.385.901,67)	99,67
Koreksi Nilai penyisihan piutang	(3.993.859,83)		(3.993.859,83)	100%
Ekuitas Akhir	1.333.241.057.563,15	1.248.434.805.872,24	84.806.251.690,90	9,06

Penjelasan lebih rinci atas pos pos laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saldo ekuitas awal tahun 2016 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2015 (audited) sebesar Rp1.248.434.805.872,24.
2. Selisih revaluasi aset tetap untuk tahun 2016 sebesar –Rp30.845.460,00)
3. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp90.874.556.890,83 merupakan surplus /Defisit atas kegiatan operasional untuk periode tahun 2016 berdasarkan basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada neraca.
4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp32.547.965.835,23 terdiri dari :
 - A. Transaksi yang menambah sebesar Rp41.563.170.151,23 yang terdiri dari :
 - a. Penyusutan aset lain2 sebesar Rp.26.192.260.116,00 yang belum di bebaskan pada tahun lalu.
 - b. Penyeusian nilai Investasi pemda kota ternate di tahun 2016 akibat perusahaan daerah mengalami kerugian sehingga nilai invertasi perlu di sesuaikan kembali sebesar Rp6.680.224.333,21.
 - c. Koreksi aset tetap akibat penghapusan, kurang catat dan lain dengan total nilai sebesar Rp487.807.844,00
 - d. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap tahun lalu besar Rp8.114.014.339,95
 - e. Kekurangan pencatatan pelunasan piutang TGR Rp13.973.518,00
 - f. Koreksi beban dibayar dimuka tahun lalu sebesar Rp74.890.000,07
 - B. Untuk transaksi pengurang sebesar Rp9.005.630.649,00 terdiri dari :
 - a. Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu sebesar Rp3.190.147.122,00
 - b. Koreksi aset tetap Rp.259.070.000,00
 - c. Koreksi pecatatan PFK Rp75.410.465,00
 - d. Koreksi kesalahan pengakuan Pendapatan PPJ bulan des 2016 Rp1.335.466.444,00
 - e. Pencatatan piutang pbb thn 2002-2013 sebesar Rp4.135.537.618,00
 - f. Pengemblian belanja tahun lalu Rp9.999.000,00

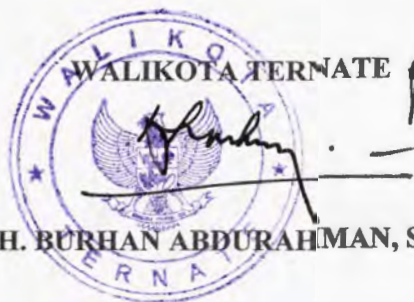
BAB VII PENUTUP

Pemerintah Kota Ternate memiliki 41 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 41 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada WaliKota melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate TA 2016 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik dibidang ekonomi, social maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate TA 2016.



Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H, M.M